PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LKJIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

JL. SEMAN NO.001 RT.001
KEMBANG JANGGUT 75557

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Kembang Janggut disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kembang Janggut kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kembang Janggut, 05 Februari 2025
Plt. Camat Kembang Janggut

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

SUHARTONO, S.KM.
Pembina
NIP 19810217 200801 1 014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vii
Daftar Grafik		viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	7
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	8
	E. Sumber Daya Aparatur	9
	F. Sumber Daya Keuangan	11
	G. Isu-Isu Strategis	11
	H. Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**	14
	A. Perencanaan Kinerja	14
	1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	14
	2. Tujuan dan Sasaran	15
	3. Strategi	15
	4. Arah Kebijakan	16
	5. Program	17
	B. Perjanjian Kinerja	17
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2024	27
	1. Alokasi Anggaran Belanja	27
	2. Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	31
	A. Capaian Kinerja	32
	1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	33

	2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	80
	3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	87
	4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Kembang Janggut (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi NIlai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.	92
	5	Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.	92
	6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	99
	7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	103
	B.	Realisasi Anggaran	108
BAB IV	**PENUTUP**		120
	A	Kesimpulan	120
	B	Perbaikan Kedepan	123
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024.....	6
Tabel 1.3	PNS Berdasarkan Pendidikan.....	10
Tabel 1.4	PNS Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.1	Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	15
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel 2.3	Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 2.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	22
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024	27
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024.....	27
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	28
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024.....	33
Tabel 3.3	Analisa Hasil Survey	35
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 ...	47
Tabel 3.5	Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024.....	55
Tabel 3.6	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut	56
Tabel 3.7	Daftar Wajib SPT Tahunan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024.....	59
Tabel 3.8	Laporan Tahunan Status Gizi Balita Tahun 2024.....	72
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	81
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	82
Tabel 3.11	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	88
Tabel 3.12	Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	93

Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024.....	99
Tabel 3.14	Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024	103
Tabel 3.15	Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kembang Janggut Bulan Januari s/d Desember 2024	105
Tabel 3.16	Daftar Realisasi APBDes Tahun 2023 Per 30 Desember 2024.....	107
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatam Tahun 2024 Kecamatan Kembang Janggut	110
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatam Tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kembang Janggut	4
Gambar 3.1	Pelaporan LHKPN Kecamatan Kembang Janggut.....	58
Gambar 3.2	Laporan Keterisian Data E-Pantau Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024.....	60
Gambar 3.3	Penyampaian Laporan LKjIP Tahun 2024	61
Gambar 3.4	Indeks Perkembangan Harga Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	74
Gambar 3.5	SE Dan Plang Ruangan Bebas Asap Rokok	77
Gambar 3.6	Infografis Anggaran Dan Realisasi Kecamatan Kembang Janggut	108

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut, 2024	4
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Jenis Kelamin, 2024	6
Grafik 1.3	Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2024	7
Grafik 1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	10
Grafik 1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	11
Grafik 3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	33
Grafik 3.2	Indeks Mutu Pelayanan Hasil Penilaian 9 Unsur Pelayanan	36
Grafik 3.3	Penilaian Responden Berdasarkan Persyaratan	36
Grafik 3.4	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Persyaratan	37
Grafik 3.5	Penilaian Responden Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur	37
Grafik 3.6	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur	38
Grafik 3.7	Penilaian Responden Berdasarkan Waktu Penyelesaian	38
Grafik 3.8	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Waktu Penyelesaian	39
Grafik 3.9	Penilaian Responden Berdasarkan Biaya/Tarif	39
Grafik 3.10	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Biaya/Tarif	40
Grafik 3.11	Penilaian Responden Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan	40
Grafik 3.12	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan	41
Grafik 3.13	Penilaian Responden Berdasarkan Kompetensi Pelaksanaan	41
Grafik 3.14	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Kompetensi Pelaksanaan	42
Grafik 3.15	Penilaian Responden Berdasarkan Perilaku Pelaksana	42
Grafik 3.16	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Perilaku Pelaksana	43
Grafik 3.17	Penilaian Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	43
Grafik 3.18	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	44
Grafik 3.19	Penilaian Responden Berdasarkan Sarana dan Prasarana	44
Grafik 3.20	Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Sarana dan Prasarana	45

Grafik 3.21	Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	53
Grafik 3.22	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut	56
Grafik 3.23	Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2024 Sasaran ke-1 sampai dengan ke-20 ……...	57
Grafik 3.24	Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2024 Sasaran ke-21 sampai dengan ke-41 ……...	68
Grafik 3.25	Perbandingan Realisasi Nilai IKM ……	81
Grafik 3.26	Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Kembang Janggut Dengan Kecamatan Lain Tahun 2024 ……...	92

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Kembang Janggut dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

(1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021-2026;
(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024;
(3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024; dan
(4) Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kembang Janggut Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kembang Janggut
2. Mendorong Kecamatan Kembang Janggut di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kembang Janggut untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Kembang Janggut di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kecamatan Kembang Janggut merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Kembang Janggut terletak antara 115º46'–116º28' Bujur Timur dan 0º02'–0º27' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 2.160,90 km^2. Ketinggian Kecamatan Kembang Janggut sekitar 18 meter dari permukaan laut.

Secara administratif, Kecamatan Kembang Janggut berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kecamatan Tabang
Sebelah timur : Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur
Sebelah selatan : Kecamatan Kenohan Dan Kecamatan Muara Kaman
Sebelah barat : Kecamatan Tering dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat

Wilayah Kecamatan Kembang Janggut terdiri dari 11 desa, diantaranya Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long Beleh Modang, Desa Bukit Layang, Desa Muai, dan Desa Perdana. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Kembang Janggut. Dari kesebelas desa tersebut, Desa Long Beleh Modang merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu 80 kilometer, sedangkan Desa Hambau merupakan desa yang letaknya paling dekat dari ibukota kecamatan, yaitu 5 kilometer. Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Kembang Janggut dapat ditempuh melalui jalan darat maupun jalan sungai.

Seluruh desa di Kecamatan Kembang Janggut terletak pada bantaran sungai. Salah satu sungai besar yang ada di Kecamatan Kembang Janggut, yaitu Sungai Belayan yang memanjang dari Desa Long Beleh Modang di bagian hulu sungai hingga ke Desa Genting Tanah di bagian hilirnya. Dari sungai tersebut, terdapat pula beberapa anak sungai yang mengalir ke seluruh desa. Disamping itu, terdapat juga 11 danau. Danau terluas, yaitu Danau Pulau Indah dan Pulau Long Beleh dengan luas masing-masing 10 hektar.

Berdasar letak geografisnya, Iklim Kecamatan Kembang Janggut beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan per bulannya 346,40 mm dan rata- rata hari hujan berkisar 6 hari per bulan di tahun 2024. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 552 mm dengan 20 hari hujan selama sebulan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 197 mm dengan 10 hari hujan selama sebulan.

(sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2024)

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kembang Janggut

Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan Kembang Janggut sebagai berikut:

Grafik 1.1 Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut

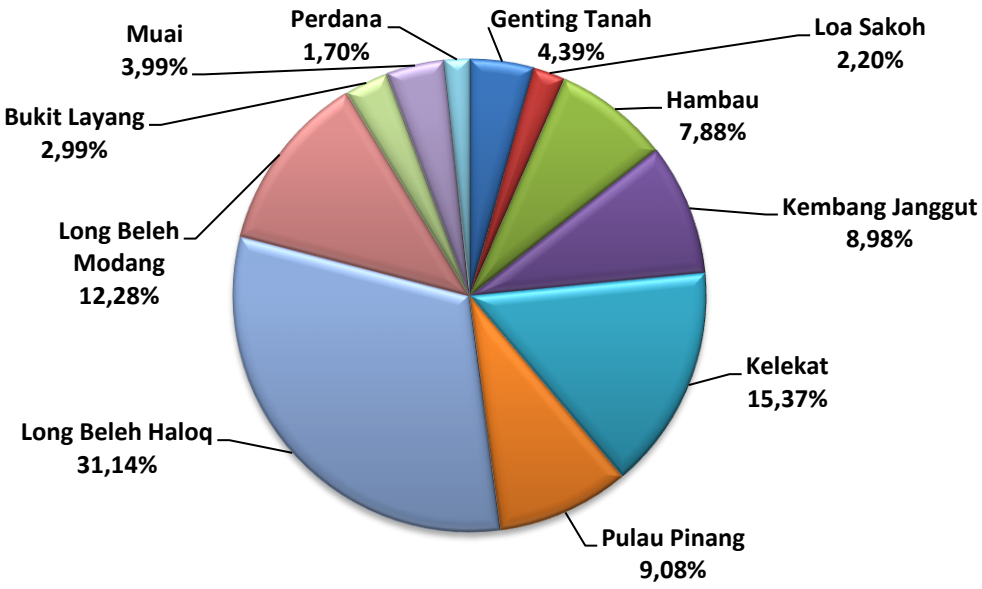

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut

Desa/Kelurahan		Luas (km^2)	Persentase (%)	Keterangan
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Genting Tanah	95,90	4,4	Desa
2.	Loa Sakoh	46,90	2,2	Desa
3.	Hambau	170,00	7,9	Desa
4.	Kembang Janggut	193,50	9,0	Desa
5.	Kelekat	332,90	15,4	Desa
6.	Pulau Pinang	197,00	9,1	Desa
7.	Long Beleh Haloq	673,60	31,2	Desa
8.	Long Beleh Modang	264,80	12,3	Desa
9.	Bukit Layang	64,00	3,0	Desa
10	Muai	85,80	4,0	Desa
11	Perdana	36,50	1,7	Desa
Jumlah		**2.160,90**	**100,0**	

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kembang Janggut

Sasaran utama pembangunan nasional secara umum, dan Kecamatan Kembang Janggut secara khusus adalah menyangkut kesejahteraan rakyat sebagaiman telah dicanangkan dalam setiap program pemerintah. Oleh sebab itu, data mengenai kependudukan sangatlah diperlukan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Penduduk Kecamatan Kembang Janggut pada awal tahun 2024 tercatat sebanyak 26.620 orang yang terdiri dari 13.998 laki-laki (53%) dan 12.622 perempuan (47%) yang tersebar di 11 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi kependudukan yang ada pada desa yang bersangkutan. Secara umum pesebaran penduduk di Kecamatan Kembang Janggut dapat dikatakan cukup merata di setiap desa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Kembang Janggut yang merupakan ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 4.425 orang (16,62%),

sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Loa Sakoh dengan jumlah penduduk sebanyak 731 orang (2,75%). Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Kembang Janggut per desa yaitu:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

Desa/Kelurahan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Genting Tanah	1.298	1.252	2.550	9,58%
2.	Loa Sakoh	385	346	731	2,75%
3.	Hambau	1.791	1.666	3.457	12,99%
4.	Kembang Janggut	2.327	2.098	4.425	16,62%
5.	Kelekat	1.054	924	1.978	7,43%
6.	Pulau Pinang	798	757	1.555	5,84%
7.	Long Beleh Haloq	1.584	1.394	2.978	11,19%
8.	Long Beleh Modang	1.720	1.521	3.241	12,18%
9.	Bukit Layang	819	704	1.523	5,72%
10.	Muai	1.141	1.007	2.148	8,07%
11.	Perdana	1.081	953	2.034	7,64%
Jumlah Penduduk Tahun 2024		**13.998**	**12.622**	**26.620**	**100%**

Sumber Data: SIAK Kecamatan Kembang Janggut

Grafik 1.2 Persentase Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Jenis Kelamin, 2024

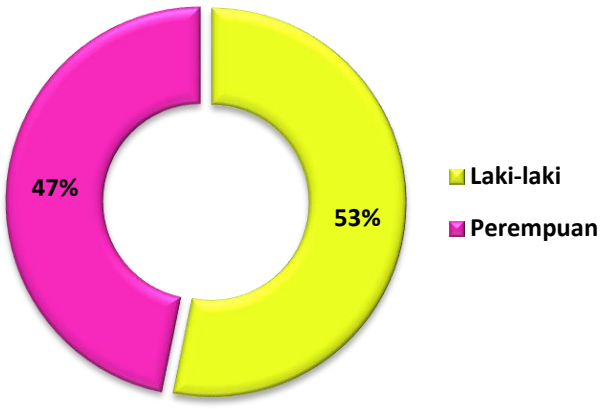

Grafik 1.3 Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2024

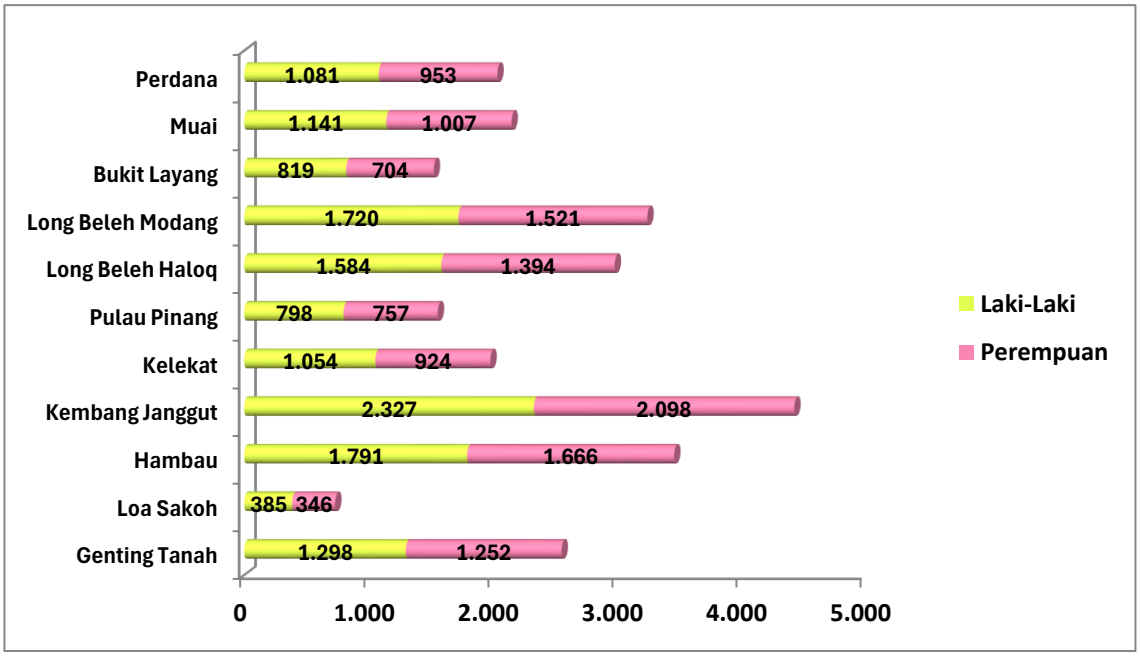

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara

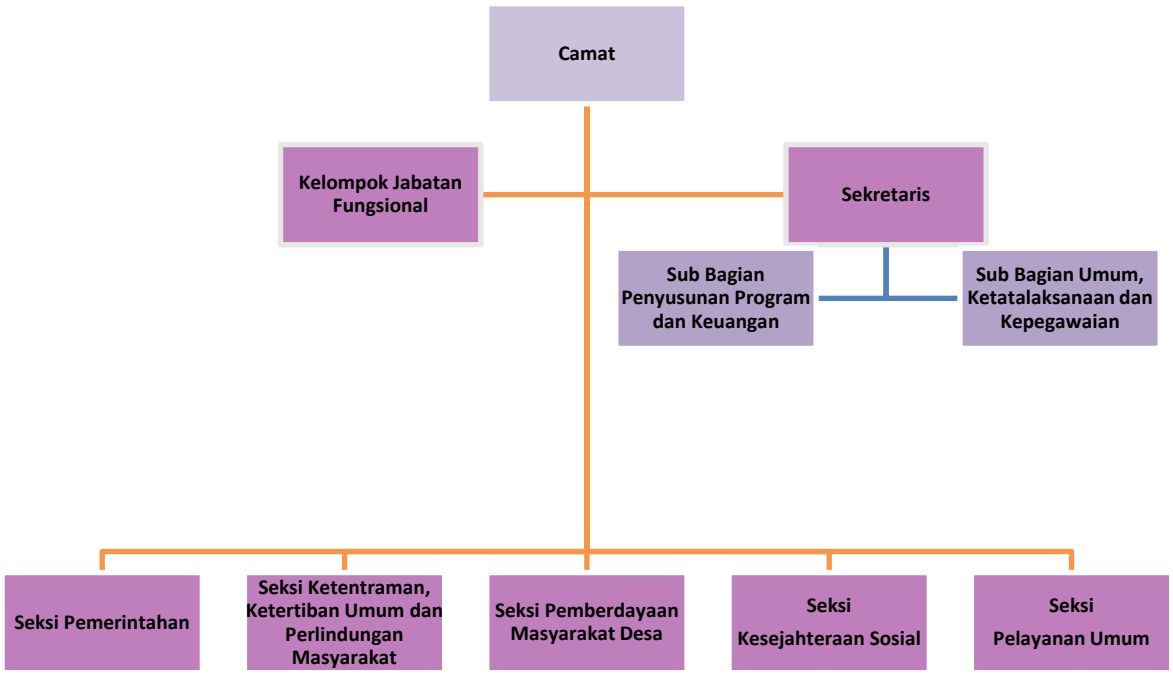

Pembentukan Kecamatan Kembang Janggut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
   a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas pokok dari Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut yaitu :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
- Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta LembagaKemasyarakatan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2024 sebanyak 30 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTP	1	0	1	3%
2	SMA	14	6	20	67%
3	S1	6	0	6	20%
4	S2	3	0	3	10%
Jumlah		**24**	**6**	**30**	**100%**

Grafik 1.4. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

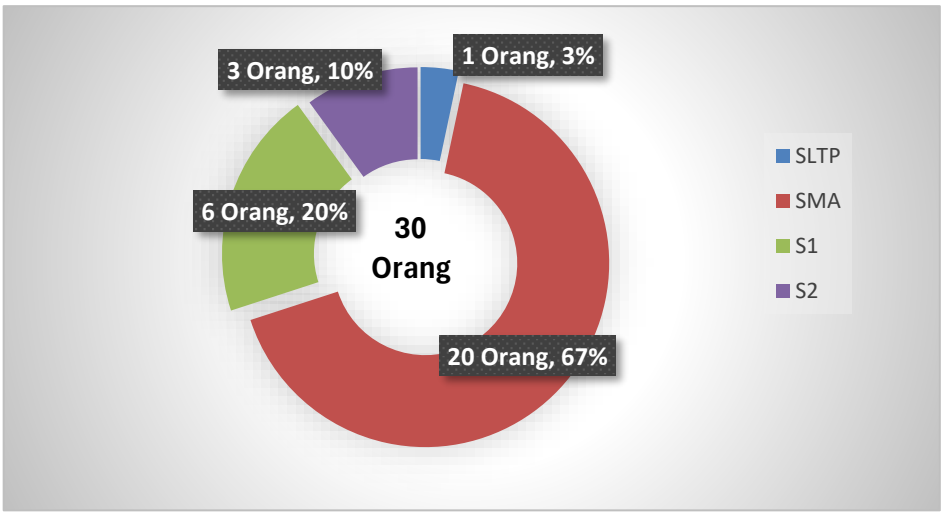

2) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	0	1	3%
2	II	14	3	17	57%
3	III	6	3	9	30%
4	IV	3	0	3	10%
	Jumlah	**24**	**6**	**30**	**100%**

Grafik 1.5. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

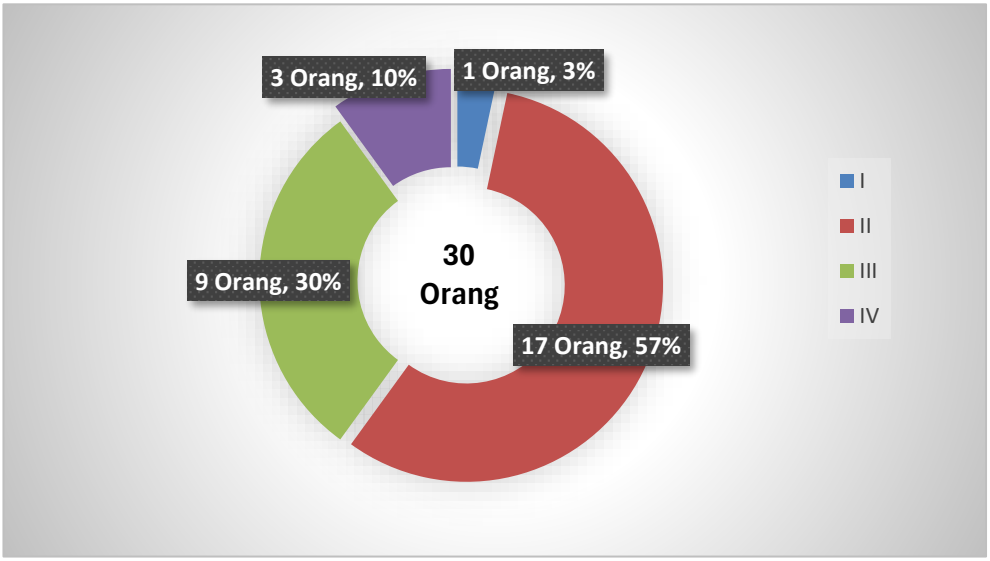

F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kembang Janggut pada Tahun 2024 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kembang Janggut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.154.376.622 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kembang Janggut pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kembang Janggut. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Kembang Janggut adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Kembang Janggut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kembang Janggut yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kembang Janggut adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : **"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**				
Misi yang Relevan	**Tujuan**		**Sasaran**	
	Uraian	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Indikator Kinerja**
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD

Kecamatan Kembang Janggut untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Kembang Janggut Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi Kecamatan Kembang Janggut	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

No.	Strategi Kecamatan Kembang Janggut	Arah Kebijakan
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

5. Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Kabupten Kutai Kartanegara untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	10
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	3
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	Level 3
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	Baik (B) 60-70
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	74
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
30	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	70
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,81
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
40	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1

Sumber : PK Perubahan Kantor Camat Kembang Janggut 2024

Di tahun 2024 terdapat 41 (empat puluh satu) poin perjanjian kinerja dengan 45 (empat puluh lima) indikator yang menjadi target Perangkat Daerah Kantor Camat Kembang Janggut, dimana terdiri dari 4 (empat) indikator utama dan 41 (dua puluh satu) indikator tambahan.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2024 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Kembang Janggut tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data Awal (2021)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60,71	80	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	0	10	15
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	3	5

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data Awal (2021)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari /tahun	Persen	100	100	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	*)	100	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 /bulan	Persen	*)	100	100
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100	100	100
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	*)	100	100
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data Awal (2021)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	*)	100	100
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1	1	1
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	*)	70	80

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data Awal (2021)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	*)	100	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	*)	Level 3	Level 3
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	70	74	78
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	0	75	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	*)	1	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	*)	14	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	*)	100	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	*)	100	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data Awal (2021)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN /tanggal 25 /bulan	Persen	*)	40	40
30	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	*)	3,6	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	65,89	73	80,01
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	60,95	64	70,02
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	*)	49,57	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,50	8,95	9,05
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	*)	Zona Hijau	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100
37	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	*)	70	85
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,82	73,81	74,51
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	*)	100	100
40	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	*)	1	1
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	*)	1	1

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut 2024

C. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun Anggaran 2024, Kecamatan Kembang Janggut melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 15,275,000,481,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2024 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar **Rp. 17,154,376,622,-.** Selanjutnya dapat kita lihat rincian penambahan alokasi anggaran Kantor Camat Kembang Janggut Tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 15,275,000,481	Rp. 17,154,376,622	Rp. 1.879.376.141

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp 14.781.539.481	Rp 16.655.687.622	Rp 1.874.148.141
Belanja Modal	Rp 493.461.000	Rp 498.689.000	Rp 5.228.000
Total	Rp 15.275.000.481	Rp 17.154.376.622	Rp 1.879.376.141

2. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Kembang Janggut pada Tahun 2024 merencanakan 4 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8.
Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.236.739.000	8.744.684.000	1.507.945.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000	45.000.000	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000	45.000.000	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.191.739.000	8.699.684.000	1.507.945.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.091.739.000	1.091.739.000	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.100.000.000	7.607.945.000	1.507.945.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	361.000.000	499.572.872	138.572.872
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	361.000.000	499.572.872	138.572.872
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	361.000.000	499.572.872	138.572.872
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.000	350.000.000	150.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200.000.000	350.000.000	150.000.000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	175.000.000	325.000.000	150.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	25.000.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.477.261.481	7.560.119.750	82.858.269
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.000.000	245.000.000	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	7.500.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	7.500.000	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	7.500.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.500.000	7.500.000	-

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000	200.000.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.530.518.097	5.573.813.197	43.295.100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.289.918.097	5.289.918.097	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	113.135.100	98.135.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	210.600.000	155.760.000	(54.840.000)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.500.000	32.500.000	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	7.500.000	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.300.000	419.300.000	25.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.800.000	18.800.000	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.500.000	5.500.000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	-	(5.000.000)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	270.000.000	30.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.000.000	45.000.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.500.000	332.063.169	24.563.169
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	135.596.041	45.596.041
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	178.967.128	(21.032.872)

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.443.384	957.443.384	(10.000.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.000.000	203.000.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.443.384	167.443.384	-
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	(10.000.000)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	480.000.000	480.000.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	90.000.000	-
	15.275.000.481	**17.154.376.622**	**1.879.376.141**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kembang Janggut dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

- Tingkat Realisasi Positif

  Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

- Tingkat Realisasi Negatif

  Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja **Tujuan Renstra** Kecamatan Kembang Janggut pada semester 2 tahun 2024 yaitu sebesar **90,42**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	B (70)	90,42	129,17%	Sangat Tinggi	Realisasi dibagi dengan Target	Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang sudah ditetapkan dikarenakan adanya SOP, Jaringan internet yang memadai.

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 juga bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

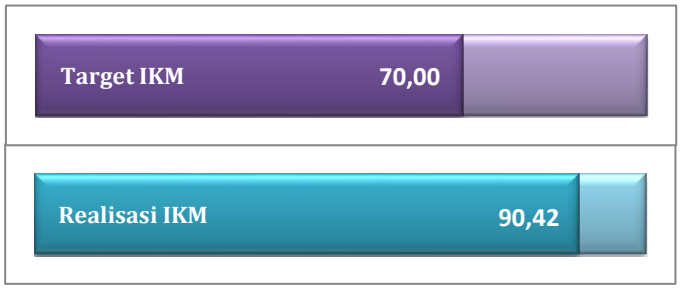

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

- **Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM)**

Salah satu indikasi kepemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilisator dan dinamisator / agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pelaksananan kegiatan survey berlangsung pada bulan Januari dan Oktober Tahun 2024 terhadap seluruh bidang Pelayanan dan dilaporkan sebanyak 2 kali setahun (per semester). Sampel yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada Responden yang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut pada bulan pelaksanaan survey.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik, dimana pelayanan yang harus diukur,yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey diperoleh data yang dihimpun dari 143 (seratus empat puluh tiga) kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata dari 9 (sembilan) unsur pelayanan pada tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisa Hasil Survey

No	Unsur Pelayanan	Indeks & Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,49
2	Prosedur	3,48
3	Waktu pelayanan	3,33
4	Biaya/tarif	3,96
5	Produk layanan	3,49
6	Kompetensi pelaksana	3,64
7	Perilaku pelaksana	3,74
8	Sarana dan prasarana	3,88
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,55
	Indeks Pelayanan	**90.42**
	Mutu Pelayanan	**A**
	Kinerja Unit Pelayanan	**Sangat Baik**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan” pada semester 2 tahun 2024 memperoleh nilai **90,42** dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **129,17%**, sehingga target kinerja **tercapai**. Hal-hal yang membuat target kinerja tercapai/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel analisa hasil survey diperoleh nilai indeks pelayanan untuk 9 (sembilan) unsur pelayanan, untuk penjelasan masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

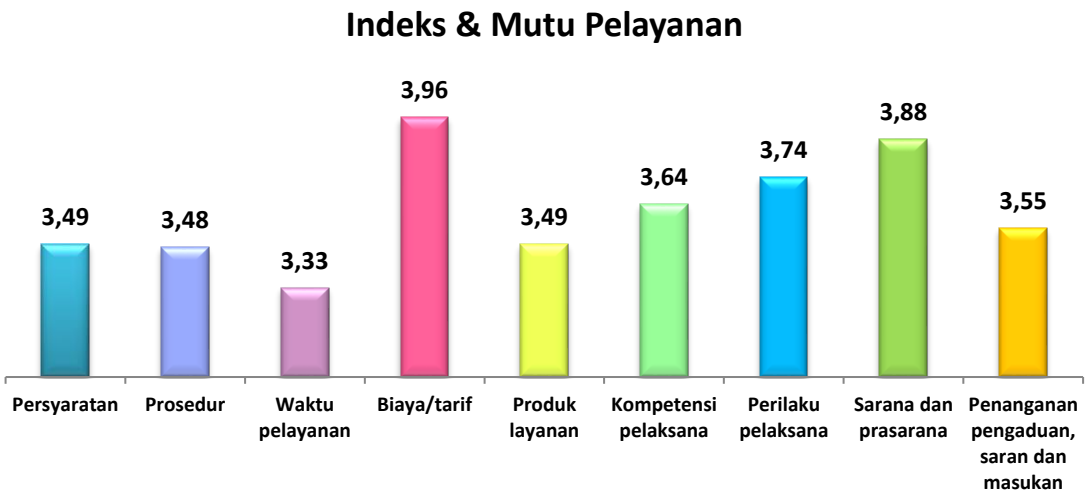

Grafik 3.2. Indeks Mutu Pelayanan Hasil Penilaian 9 Unsur Pelayanan

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

1. Unsur Persyaratan

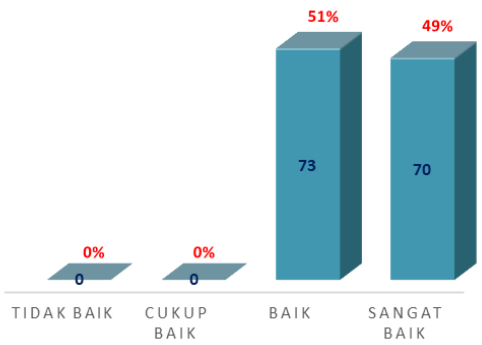

Grafik 3.3. Penilaian Responden Berdasarkan Persyaratan

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Dapat dilihat kesesuaian persyaratan mendapat penilaian baik sebesar 51% sedangkan sangat baik sebesar 49%, untuk tidak baik dan kurang baik masing-masing 0%, dari hasil diatas didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,49 ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur persyaratan yang diajukan sudah sesuai SOP yang ada. Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

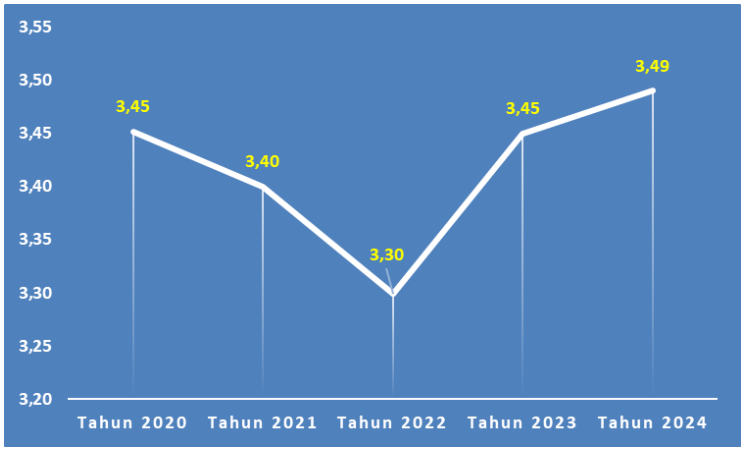

Grafik 3.4. Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Persyaratan

2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

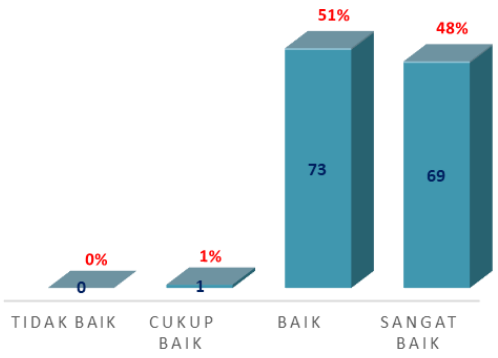

Grafik 3.5. Penilaian Responden Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dapat dilihat kemudahan dalam melakukan pengurusan mendapat penilaian baik sebesar 51% sedangkan sangat baik sebesar 48%, untuk tidak baik sebesar 0% dan cukup baik sebesar 1%, dari hasil diatas

didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,48 ini berarti bahwa kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur kedua sudah sesuai SOP yang ada. Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

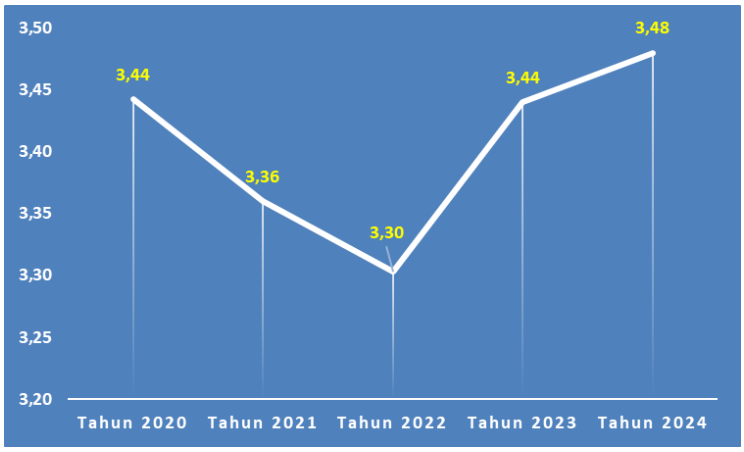

Grafik 3.6. Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. Unsur Waktu Penyelesaian

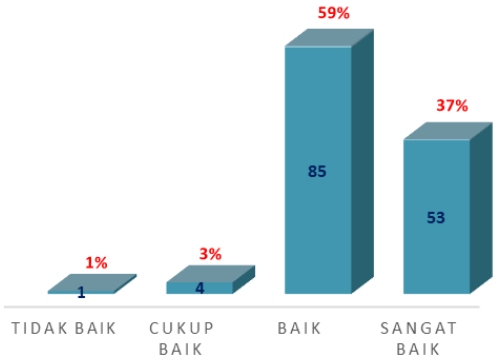

Grafik 3.7. Penilaian Responden Berdasarkan Waktu Penyelesaian

Dapat dilihat kecepatan waktu dalam penyelesaian berkas mendapat penilaian baik sebesar 59% sedangkan sangat baik sebesar 37%, untuk tidak baik dan cukup baik masing-masing 1% dan 3%, dari hasil diatas didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,33 ini berarti bahwa tingkat kecepatan petugas dalam melakukan pelayanan serta

penyelesaian berkas sudah sesuai SOP yang ada, walaupun masih ada total 1% yang menyatakan pelayanan yang diberikan lambat, dan ini akan menjadi evaluasi selanjutnya agar dapat meningkatkan lagi kinerjanya. Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

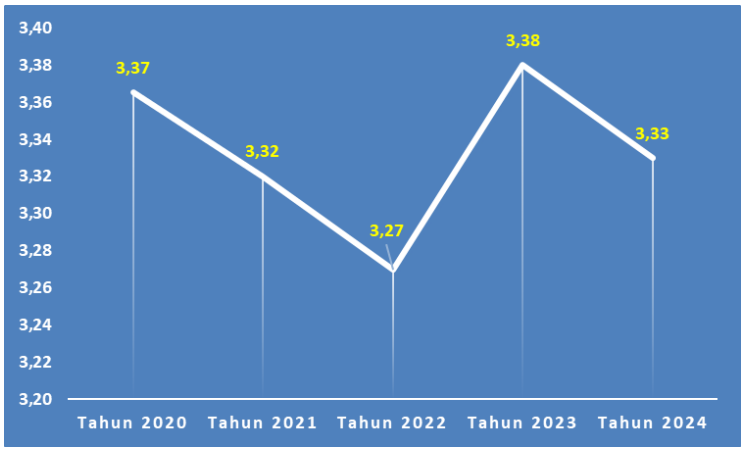

Grafik 3.8. Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Waktu Penyelesaian

4. Unsur Biaya / Tarif

Untuk unsur pelayanan keempat yaitu kesesuaian biaya / tarif yang diberikan oleh petugas kepada jenis pelayanan yang ada didapat sebesar 97% gratis dan murah sebesar 3%, sedangkan sangat mahal dan cukup mahal sebesar 0% dan 1%, dari hasil ini didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,96 Ini berarti biaya / tarif yang diberikan oleh petugas sudah sesuai SOP yang ada berdasarkan jenis pelayanan yang diurus oleh responden.

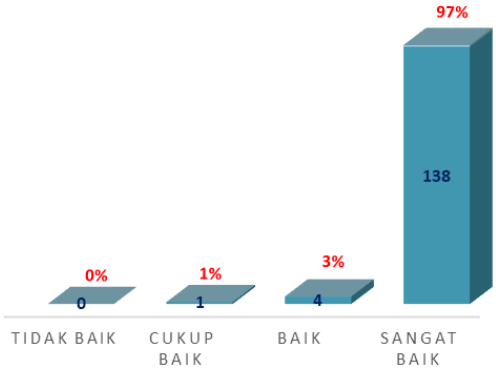

Grafik 3.9. Penilaian Responden Berdasarkan Biaya/Tarif

Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

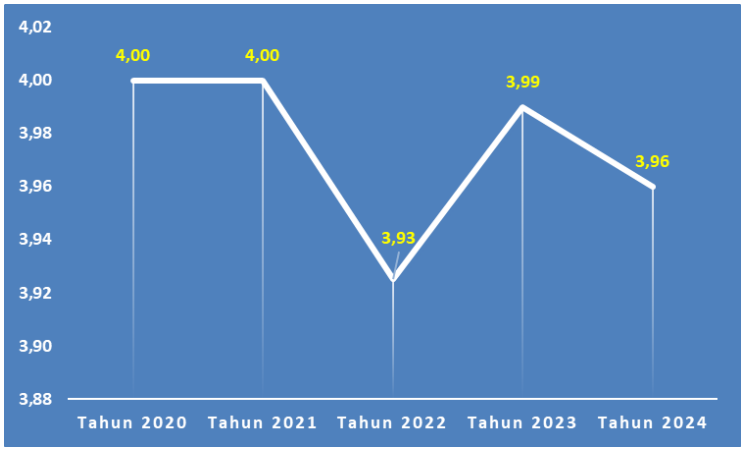

Grafik 3.10. Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Biaya/Tarif

5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

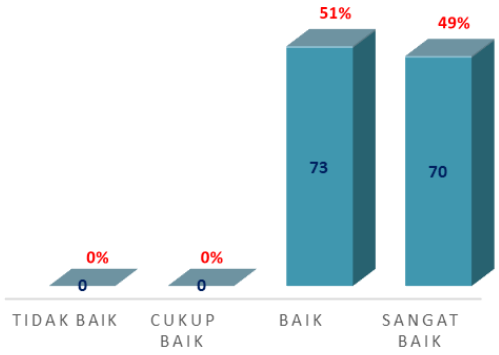

Grafik 3.11. Penilaian Responden Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan

Dapat dilihat kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan mendapat penilaian 51% sedangkan sangat sesuai sebesar 49%, untuk tidak sesuai dan kurang sesuai masing-masing 0%, dari hasil ini didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,49 ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan yang ada di masing-masing unit pelayanan kantor camat Kembang Janggut sudah sesuai peraturan pemerintah dan SOP yang ada. Jika dibandingkan Indeks dan mutu

pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

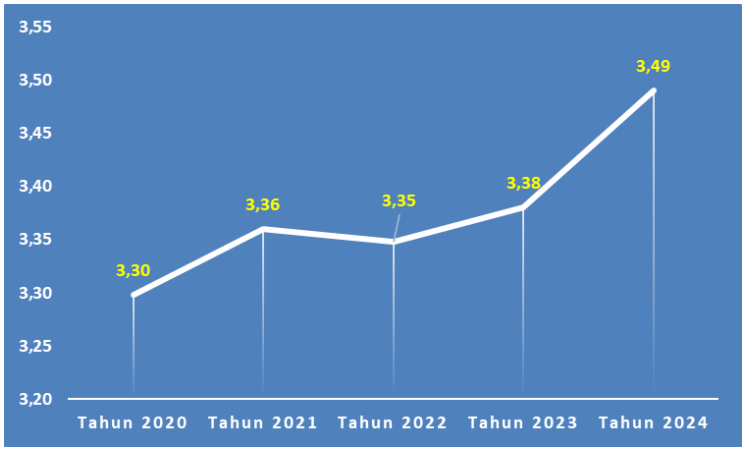

Grafik 3.12.
Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Unsur Kompetensi Pelaksanaan

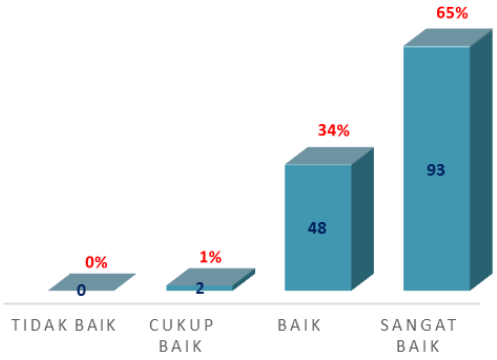

Grafik 3.13. Penilaian Responden Berdasarkan Kompetensi Pelaksanaan

Dari Unsur pelayanan yang keenam ini dapat dilihat hasil kompetensi petugas dengan kategori mampu mendapat penilaian 34% sedangkan sangat mampu/terampil sebesar 65%, untuk tidak mampu dan kurang mampu masing-masing 0% dan 1%, dari hasil ini didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,64 ini berarti bahwa petugas pelayanan yang ada pada masing-masing unit pelayanan sudah memahami dan menguasai tugas mereka dalam memberikan pelayanan.

Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

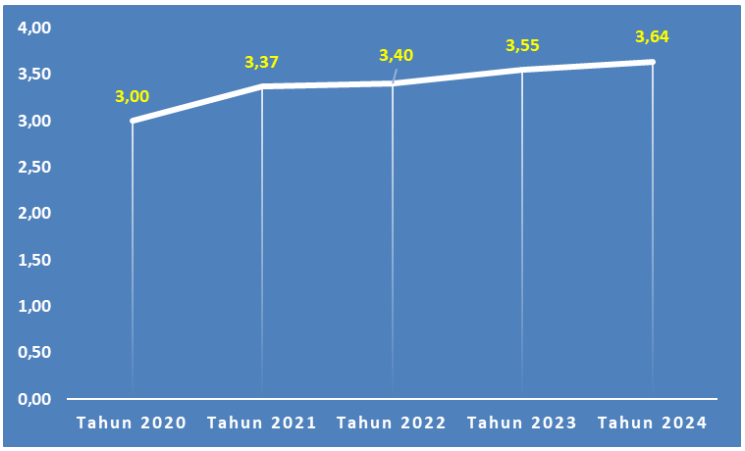

Grafik 3.14.
Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Kompetensi Pelaksanaan

7. Unsur Perilaku pelaksana

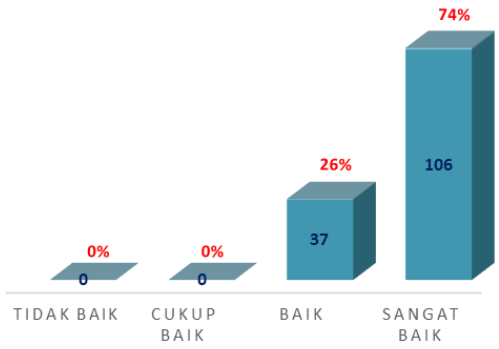

Grafik 3.15. Penilaian Responden Berdasarkan Perilaku Pelaksana

Dari Unsur pelayanan perilaku pelaksana dapat dilihat untuk seluruh petugas dalam melakukan pelayanan kepada responden mendapat kategori sopan/ramah dan sangat sopan/sangat ramah. Petugas selain dituntut harus menguasai aturan serta SOP yang ada, petugas juga harus bisa tetap ramah dan sopan dalam melayani serta memahami berbagai karakter responden yang datang ke unit pelayanan, ini dikarenakan agar petugas bisa selalu menjaga kenyamanan dan keamanan dilingkungan

unit pelayanan, dari hasil ini didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,74. Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

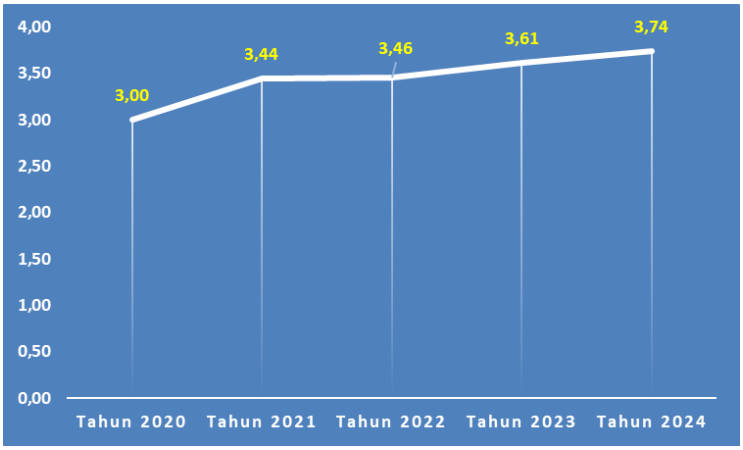

Grafik 3.16. Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Perilaku Pelaksana

8. Unsur Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan

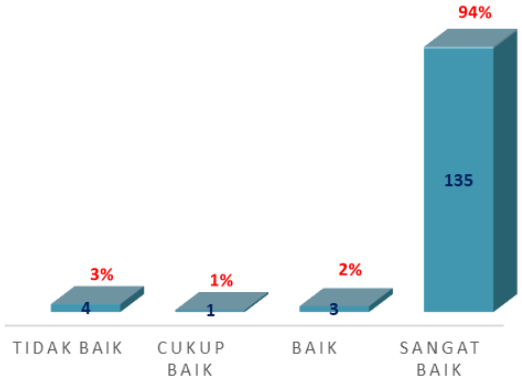

Grafik 3.17.
Penilaian Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Dari Unsur pelayanan penanganan pengaduan, sarana dan masukan dapat dilihat penanganan pengaduan dapat dikelola dengan baik sebesar 94%, berfungsi kurang optimal sebesar 2%, tidak ada sebesar 1% dan ada tapi tidak berfungsi sebesar 3%. Dari hasil ini ada sebesar 4% responden yang menilai penanganan aduan oleh petugas kurang optimal

dan ini akan menjadi evaluasi unit pelayanan agar dapat dengan sigap dan cepat dalam menangani masalah apabila terjadi aduan oleh responden / masyarakat yang kurang puas akan pelayanan yang diberikan, dari hasil ini didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,88. Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

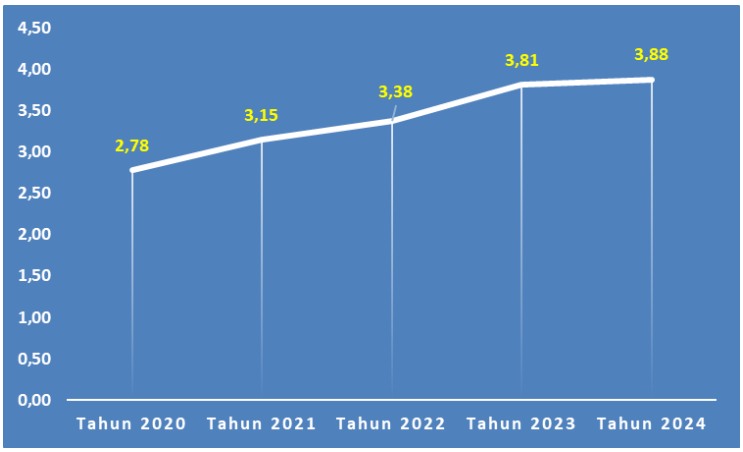

Grafik 3.18.
Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

9. Unsur Sarana dan Prasarana

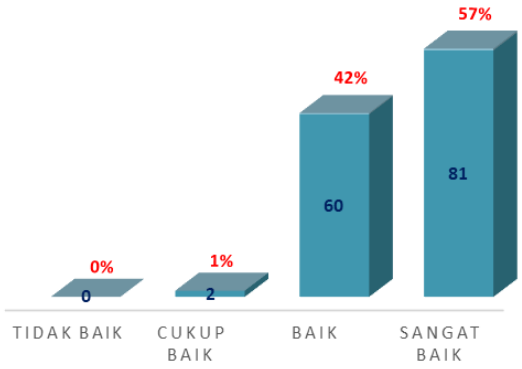

Grafik 3.19. Penilaian Responden Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Dari Unsur sarana dan prasarana dapat dilihat kualitas sarana dan prasarana untuk kategori baik sebesar 42%, sangat baik sebesar 57% dan cukup sebesar 1%. Dari tahun ketahun unit pelayanan kecamatan Kembang Janggut selalu melengkapi dan meningkatkan sarana dan

prasarana yang ada agar pelayanan yang diberikan kepada responden atau masyarakat tidak terhambat. Dari hasil ini didapatkan Indeks dan mutu pelayanan sebesar 3,55. Jika dibandingkan Indeks dan mutu pelayanan tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, maka dapat dilihat pada grafik berikut :

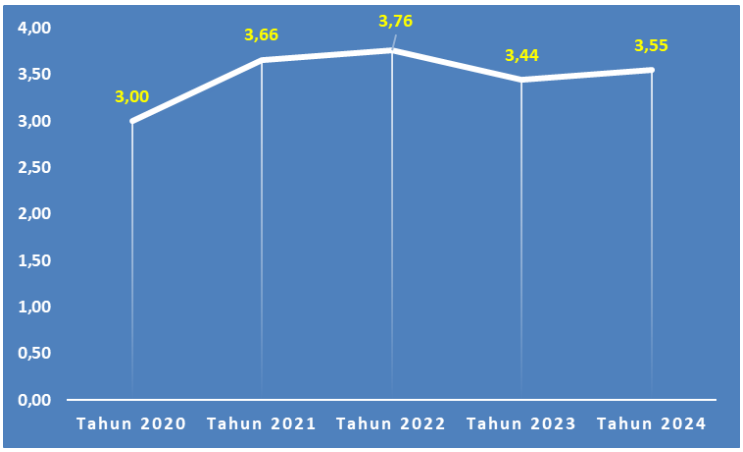

Grafik 3.20.
Perbandingan Indeks Mutu Pelayanan Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Dari keseluruhan unsur pelayanan yang telah memperoleh hasil dimana unsur ke 4 yaitu biaya / tarif memperoleh nilai indeks paling tinggi dari unsur yang lain yaitu sebesar 3,96 sedangkan unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah yaitu unsur waktu penyelesaian sebesar 3,33. Selanjutnya unsur waktu penyelesaian akan menjadi bahan evaluasi oleh tim unit pelayanan Kecamatan Kembang Janggut dalam memberikan pelayanan kepada responden atau masyarakat. Terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian berkas dipicu dari beberapa hambatan yang memang sering terjadi diantaranya listrik yang sering padam dan jaringan internet yang tidak stabil. Hambatan-hambatan yang ada akan ditanggulangi oleh tim unit pelayanan pada tahun selanjutnya dengan mengusulkan penambahan jaringan internet/wifi untuk menunjang kenyamanan, ketepatan, kecepatan dan keamanan responden atau masyarakat yang ada diwilayah kecamatan Kembang Janggut.

b. Realisasi Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Target kinerja dan sasaran perangkat daerah adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Target kinerja dan sasaran ini tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Target kinerja sasaran diambil dari indikator-indikator yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2024. Dari Perjanjian Kinerja yang sudah menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki 4 (empat) indikator yang menjadi satu sasaran utama Perangkat Daerah dan ini sudah tertuang didalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
2. Indikator Kinerja Tambahan memiliki 39 (tiga puluh sembilan) indikator dari 38 (tiga puluh delapan) sasaran tambahan yang akan dicapai pada tahun 2024. Indikator Kinerja Tambahan dalam pelaksanaan anggaran setiap tahun dapat berubah-ubah sesuai dengan program kerja Kepala Daerah yang akan diintervensi oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Selanjutnya pada anggaran perubahan tahun 2024, indicator kinerja tambahan bertambah 2 (dua) indikator menjadi 41 (empat puluh satu) indikator dari 40 (empat puluh) sasaran tambahan yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran tambahan yang dimasukkan pada perubahan tahun 2024 yaitu Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah dan Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah.

Adapun perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja sasaran utama serta sasaran tambahan pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
A	**Indikator Kinerja Utama**								
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	100	125%	Sangat Tinggi	= 100/80 * 100%
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	10	25,40	254%	Sangat Tinggi	= 25,40/10 * 100%
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	3	0	0%	Sangat Rendah	= 0/3 * 100%
B	**Indikator Kinerja Tambahan**								
1	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	B1	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
		B2	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	84,85	84,85%	Tinggi	= 84,85/100 * 100%
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	B3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	B4	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	B5	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
5	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	B6	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	B7	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	= 0/100 * 100%
7	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	B8	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	B9	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	B10	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B11	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B12	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi	= 1/1 * 100%
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	B13	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
13	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	B14	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	B15	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
15	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	B16	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	90,76	129,66%	Sangat Tinggi	= 90,76/70 * 100%

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
16	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	B17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
17	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B18	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	Level 3	3,944	100%	Sangat Tinggi	Level 3 = 100%
18	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B19	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	Baik (B) 60-70	66,27	100%	Sangat Tinggi	66,27 Didalam Rentang = 100%
19	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	74	76,83	103,82%	Sangat Tinggi	= 76,83/74 * 100%
20	Peningkatan Prestasi Inovasi	B21	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	= 0/100 * 100%
21	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
22	Meningkatnya Pengamanan Aset	B23	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	57,11	76,15%	Tinggi	= 57,11/75 * 100%
23	Meningkatnya Tata Kelola Aset	B24	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
24	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	B25	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi	= 1/1 * 100%
25	Menurunnya Prevalensi Stunting	B26	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	19,69	59,36%	Rendah	= (14-(19,69-14))/14 * 100%
26	Pengarusutamaan Gender	B27	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
27	Pengendalian Inflasi	B28	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	B29	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	90,16	225,40%	Sangat Tinggi	= 90,16/40 * 100%
29	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B30	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,1135	86,49%	Tinggi	= 3,1135/3,6 * 100%
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B31	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30%	Sangat Tinggi	= 65,92/73 * 100%
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B32	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,94%	Sangat Tinggi	= 60,12/64 * 100%
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	B33	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,20%	Sangat Tinggi	= 58,59/ 49,57 * 100%
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	B34	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	8,70	97,21%	Sangat Tinggi	= 8,70/8,95 * 100%
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	B35	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100%	Sangat Tinggi	Zona Hijau = 100%
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	B36	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
36	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	B37	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	70	90,42	129,17%	Sangat Tinggi	= 90,42/70 * 100%

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	B38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,81	73,59	99,70%	Sangat Tinggi	= 73,59/73,81 * 100%
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	B39	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	119,75	119,75%	Sangat Tinggi	= 119,75/100 * 100%
39	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	B40	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100%	Sangat Tinggi	= 1/1 * 100%
40	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	B41	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100%	Sangat Tinggi	= 1/1 * 100%
			Rata - Rata				**99,84%**	**Sangat Tinggi**	

Capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Kecamatan Kembang Janggut tahun 2024 juga bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.21.

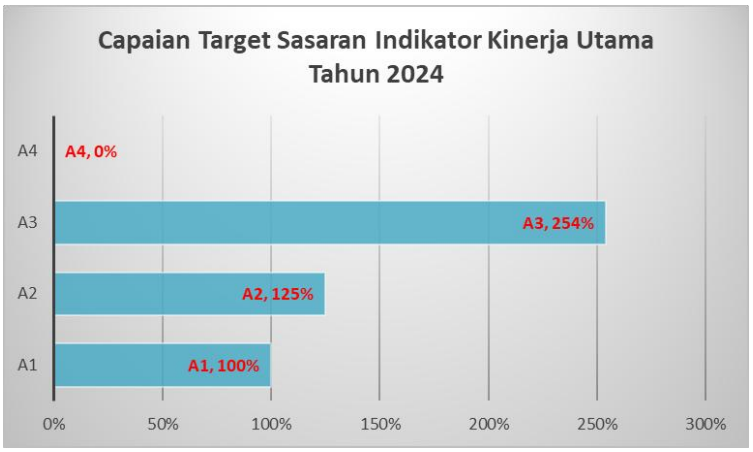

Adapun penjelasan capaian dari sasaran indikator kinerja utama Kantor Camat Kembang Janggut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) **Indikator Kinerja Utama A1 (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)**

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-1” tahun 2024 yaitu 100% dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Dalam pencapaian target ini kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya sudah dapat diatasi dengan baik yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil diatasi dengan penambahan jaringan internet/ wifi kantor, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten dapat diatasi dengan adanya peralatan cadangan yang dapat digunakan langsung apabila terjadi kerusakan sambil menunggu perbaikan yang ada. Capaian ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Kembang Janggut yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2024.

2) Indikator Kinerja Utama A2 (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja "Indikator Kinerja Utama ke-2" tahun 2024 yaitu 80% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar **125%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2024 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi 13 (tiga belas) kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik ini dikarenakan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Adapun kendala yang cukup menggangu yaitu kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib.

3) Indikator Kinerja Utama A3 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Target kinerja pada indikator ke-3 di tahun 2024 yaitu sebesar 10% dan untuk realisasinya sebesar 25,40%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **254%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Faktor pendukung dari indikator ini adalah Adanya Kemitraan Dengan Pihak Lain Selain BUMDES, SDA Yang Tersedia, dan Akses Insfrastruktur yang cukup baik, tetapi hasil yang diperoleh dari perhitungan pertumbuhan asli desa yang ada pada 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Kembang Janggut terjadi penurunan pertumbuhan Pendapatan Asili Desa di Tahun 2024. Ada beberapa faktor penghambat yang mungkin menjadi kendala sehinggan belum tercapainya target yaitu masih

lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Pencapaian target kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

No.	DESA	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DESA					KET
		TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	
1	Genting Tanah	-	-	-	29.250.000	14.250.000	Bumdesma
2	Loa Sakoh	-	-	-	15.000.000	13.000.000	Bumdesma
3	Hambau	-	-	-	15.000.000	12.000.000	Bumdesma
4	Kembang Janggut	-	-	54.015.100	27.993.250	36.570.000	Bumdes "Barokah Sinar Mandiri"
5	Kelekat	-	-	-	15.000.000	7.600.000	Koperasi
6	Bukit Layang	-	-	-	15.000.000	20.000.000	Plasma
7	Muai	-	-	4.239.842	29.082.374	61.848.901	Bumdes Pelangi Muai Bersatu
8	Perdana	-	-	-	15.000.000	-	nihil
9	Pulau Pinang	-	-	-	15.000.000	9.211.875	-
10	Long Beleh Haloq	-	-	-	15.000.000	15.000.000	Bumdesma
11	Long Beleh Modang	-	19.349.979	69.000.000	79.000.000	149.500.000	Bumdes "Etam Rakat Membangun"
Jumlah PAD		**-**	**19.349.979**	**127.254.942**	**270.325.624**	**338.980.776**	

Sumber : Kecamatan Kembang Janggut, 2024

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kembang Janggut untuk tahun 2024 yaitu

$$= \frac{(PAD_n - PAD_{n-1})}{PAD_{n-1}} \times 100$$

$$= \frac{(\text{Rp. } 338.980.776 - Rp. 270.325.624)}{Rp. 270.325.624} \times 100$$

$$= 25{,}40\ \%$$

Adapun capaian kinerja indikator pertumbuhan pendapatan asli desa yaitu

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

$$= \frac{25{,}40}{10} \times 100$$

$$= 254\ \%$$

Dari hasil diatas dapat kita lihat perkembangan pertumbuhan pendapatan asli desa dari tahun ke tahun pada table dibawah ini :

Tabel 3.6
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target Pertumbuhan PADes	0%	0%	5%	7%	10%
Pertumbuhan PADes	0%	0%	557,65%	112,43%	25,40%
% Capaian	0%	0%	11152,98%	1606,12%	253,97%

Sumber : Kecamatan Kembang Janggut, 2024

Grafik 3.22.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut

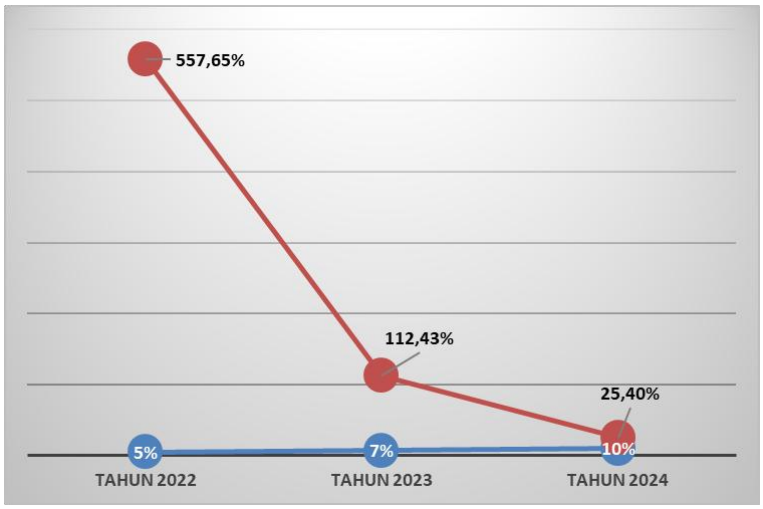

Dari grafik diatas dapat dilihat pertubuhan Pendapatan Asli Desa menunjukan penurunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, hal tersebut terjadi karena semakin tingginya target yang ditetapkan dari tahun ke tahun, tetapi jika dilihat secara capaian kinerja pertumbuhan PADes yang diperoleh masih diatas target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu 10%.

4) Indikator Kinerja Utama A4 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan)

Target kinerja pada indikator ke-4 di tahun 2024 yaitu sebesar 3% dan untuk realisasinya sebesar 0%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah**. Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya peralihan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan yaitu Pendapatan Asli Daerah kewenangan Kecamatan dilaksanakan oleh DMPTSP, sehingga tidak ada penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Tambahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 dari sasaran ke-1 sampai dengan sasaran ke-20 bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.23.
Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2024
Sasaran ke-1 sampai dengan ke-20

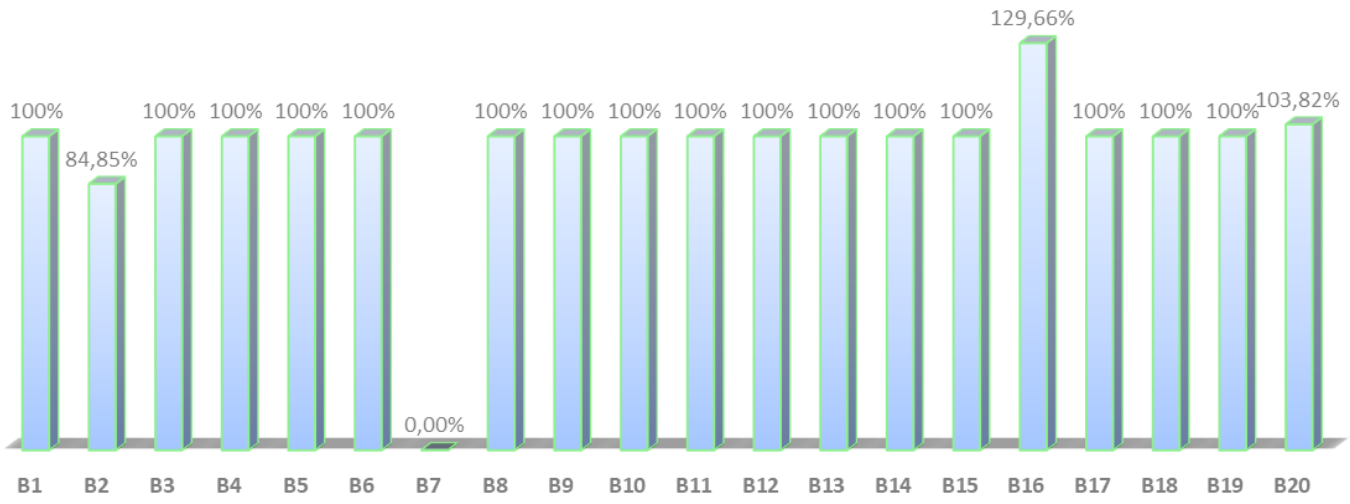

5) Indikator Kinerja Tambahan B1 (Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun)

Target kinerja indikator tambahan ke-5 tahun 2024 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 8 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website https://elhkpn.kpk.go.id sebelum tanggal 31 maret 2024. Untuk indikator ke-4 diperoleh realisasi sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Hasil pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1. Pelaporan LHKPN Kecamatan Kembang Janggut

6) Indikator Kinerja Tambahan B2 (Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun)

Target kinerja indikator ke-6 tahun 2024 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 33 ASN yang menjadi target terdapat 28 ASN yang mengisi SPT Tahunan di website https://djponline.pajak.go.id sebelum tanggal 31 maret 2024, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar **84,85%** dengan kriteria penilaian **Tinggi**. Kedepannya berdasarkan hasil ini Kecamatan Kembang Janggut khususnya di sub bagian umum,

ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan terealisasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil Pelaporan SPT Tahunan Kantor Camat Kembang Janggut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.7
Daftar Wajib SPT Tahunan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

No.	Jumlah Pegawai	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Keterangan
1	33 Orang	33 Orang	28 Orang	5 Orang	84,85%

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

7) Indikator Kinerja Tambahan B3 (Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-3 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari. Untuk SKP Seluruh ASN Kantor Camat Kembang Janggut pada bulan Januari 2024 telah selesai dibuat dan dikirim ke BKPSDM melalui website aplikasi https://kinerja.bkn.go.id , sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

8) Indikator Kinerja Tambahan B4 (Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-4 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir februari. Dari hasil monitoring kabupaten pada Unit Layanan Pengadaan di tanggal 15 februari 2024 untuk kesesuaian RUP dengan SIPD di website aplikasi https://sirup.lkpp.go.id untuk Kecamatan Kembang Janggut sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

9) Indikator Kinerja Tambahan B5 (Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan)

Indikator kinerja ke-5 yaitu tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan, Keterisian data pada aplikasi E-pantau sudah **100%** sehingga target pada indikator ini mendapat kriteria **Sangat Tinggi.** Hasil laporan keterisian E-Pantau pada link https://e-pantau.kukarkab.go.id, adapun hasil pelaporan bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2. Laporan Keterisian Data E-Pantau Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

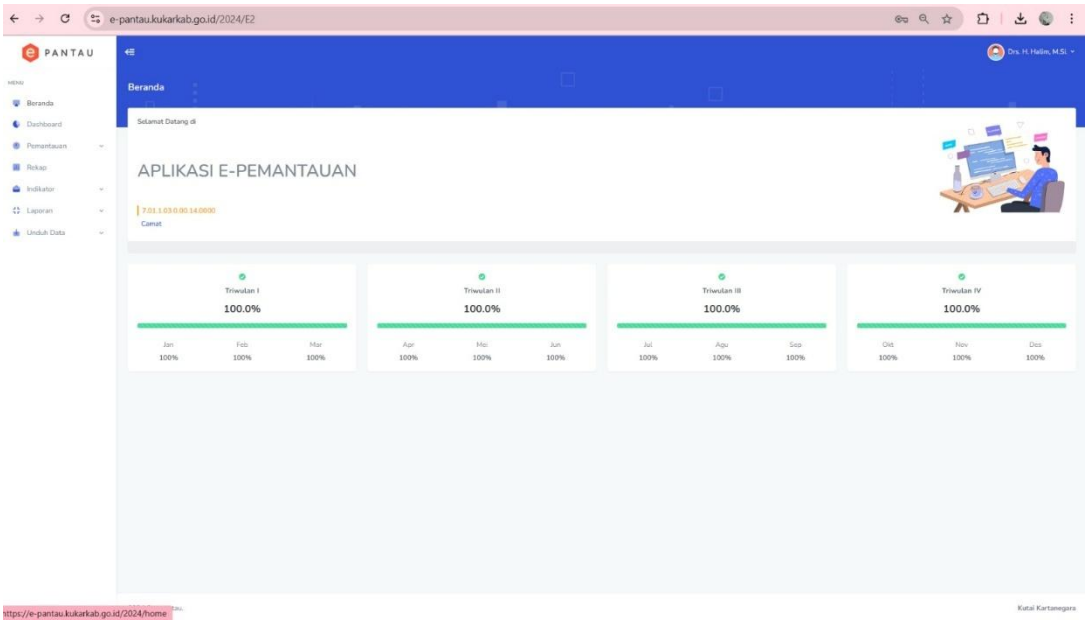

10) Indikator Kinerja Tambahan B6 (Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan)

Indikator kinerja ke-6 yaitu tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMD 100% sesuai dengan paket pengadaan BMD. Dari Daftar usulan RKBMD yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah seluruhnya sudah sesuai dengan paket pengadaan yang dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga diperoleh capaian kinerja **100%** dengan kriteria **Sangat Tinggi.**

11) Indikator Kinerja Tambahan B7 (Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-7 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan standar satuan harga. Pada indikator ini realisasi target tidak tercapai, dikarenakan Kecamatan Kembang Janggut tidak ada menyampaikan usulan Standar Harga. Jadi, realisasi target diperoleh sebesar **0%** dengan kriteria penilaian **Sangat Rendah.**

12) Indikator Kinerja Tambahan B8 (Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun)

Target kinerja indikator tambahan ke-8 tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase tingkat ketepatan waktu penyampaian LkjIP perangkat daerah. LkjIP Keamatan Kembang Janggut telah disampaikan tepat waktu pada website aplikasi https://sakip.kukarkab.go.id pada akhir bulan februari 2024. Jadi, pada indikator ini diperoleh hasil capaian **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.** Bukti penyampaian laporan bs dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.3. Penyampaian Laporan LKjIP Tahun 2024

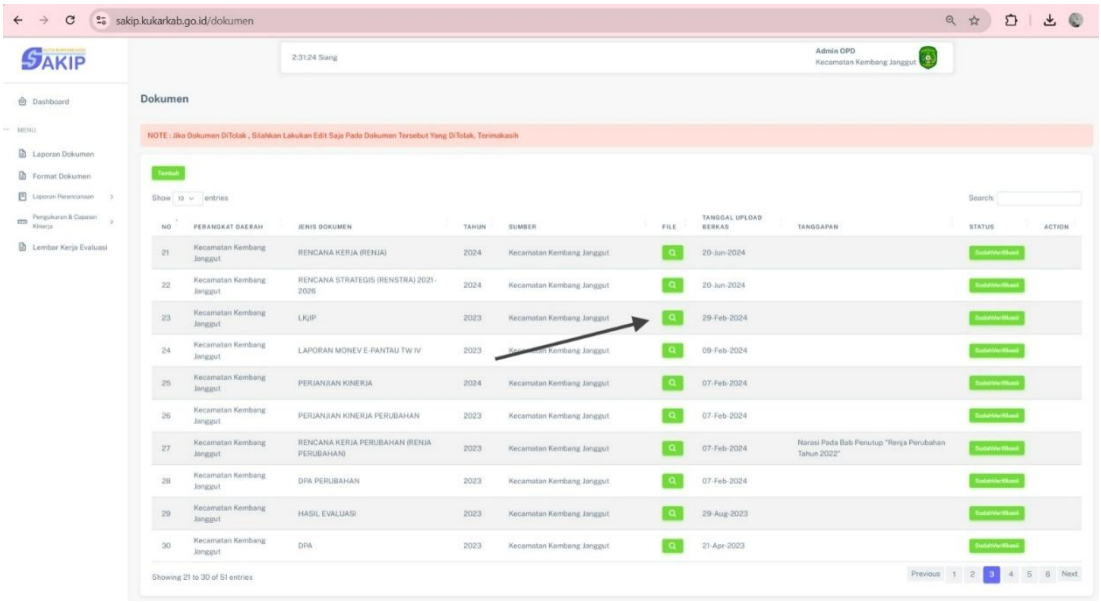

13) Indikator Kinerja Tambahan B9 (Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-9 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD. Pada tahun 2024 laporan keuangan Kecamatan Kembang Janggut telah selesai disusun dengan metode pendampingan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada bagian Akuntansi dan Bagian Aset, laporan keuangan disampaikan pada tanggal 18 Januari 2024, sehingga indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

14) Indikator Kinerja Tambahan B10 (Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-10 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Rencana Tindak Lanjut. Pada tahun 2024 laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Rencana Tindak Lanjut Kecamatan Kembang Janggut telah selesai disusun dan disampaikan dengan tepat waktu, sehingga indikator ini memperoleh capaian sebesar 100%, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

15) Indikator Kinerja Tambahan B11 Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-11 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari pelaporan hasil penialaian pelaksanaan dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kembang Janggut. Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan yaitu kegiatan Desa Presisi, hasilnya telah dibuatkan laporan pelaksanaannya serta ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan pengambilan data spasial di bulan desember tahun 2024, Dari hasil ini, target indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **100%**, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

16) Indikator Kinerja Tambahan B12 (Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir)

Target kinerja "Indikator Kinerja Tambahan ke-12 tahun 2024 yaitu menindak lanjuti temuan administrasi dan kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir sebanyak 1 temuan dan di tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 temuan yang ditindak lanjuti yaitu Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 27/S/LKPD-Kukar/04/2022, Tanggal 11 April 2022, Tentang Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap I, atas Pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021.

Temuan ini sudah ditindaklanjuti dan ditanggapi melalui surat tanggapan nomor : P.278/KEU-KBJ/900/4/2022, tanggal 13 april 2022 perihal tanggapan temuan pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2021, dan telah disampaikan pula surat tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor P.0035/KEU-KJ/900/1/2024 perihal penyelesaian Temuan BPK. Dari hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar **100%**, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

17) Indikator Kinerja Tambahan B13 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-13 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP per 30 juni 2024. Pada tahun 2024 laporan SPIP telah disampaikan dan diupload pada link googledrive https://drive.google.com/drive/folders/1bw-6Ypo6RhZNhSsatxv8Yv-uAHk_ZGDQ pada tanggal 23 juni 2024, sehingga indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **100%**, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

18) Indikator Kinerja Tambahan B14 (Internalisasi Core Values ASN Berakhlak)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-14 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari internalisasi core value ASN berakhlak. Kegiatan yang

dilakkukan terkait internalisasi core value ASN berakhlak yaitu sosialisasi implementasi, penggunaan logo berakhlak pada setiap surat kedinasan yang dibuat, Apel ASN dan pegawai setiap senin dengan membacakan panduan core value ASN berakhlak, serta pembuatan spanduk dan banner yang dipasang diruang kantor dan ruang pelayanan publik, sehingga indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **100%**, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

19) Indikator Kinerja Tambahan B15 Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-15 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kembang Janggut telah dibuat pada tanggal 08 Januari 2024 antara Camat Kembang Janggut dengan Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja turunan pejabat administrator, pengawas sampai ke pelaksana telah disusun pada tanggal 10 Januari 2024, dengan acuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kembang Janggut yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023, tanggal penyusunan ini masih masuk dalam rentang target yang ditetapkan, sehingga indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **100%**, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

20) Indikator Kinerja Tambahan B16 (Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-16 tahun 2024 yaitu sebesar 70% dari serapan anggaran berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang terbit. Pada tahun 2024 Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Kembang Janggut sebesar Rp.15.569.342.323,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.17.154.376.622,00 atau sebesar 90,76% dari Anggaran yang tersedia. Dari hasil realisasi keuangan dapat dikatakan target tercapai melebihi dari target yang ada dengan capaian sebesar **129,66%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

21) Indikator Kinerja Tambahan B17 (Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-17 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari ketersediaan dokumen manajemen risiko perangkat daerah per triwulan. Laporan manajemen risiko Kecamatan Kembang Janggut lengkap tersedia dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 selama tahun 2024. Laporan Manajemen Risiko perangkat daerah per triwulan dan untuk setiap Unit Pengelola Risiko (UPR) eselon 3 dan eselon 4 juga bisa dilihat pada link googledrive https://drive.google.com/drive/folders/1mqDPSxEJOOZahdGVDM7FJcubHy7VeqtZ , untuk indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **100%**, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

22) Indikator Kinerja Tambahan B18 (Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-18 tahun 2024 yaitu nilai maturitas SPIP perangkat daerah berada di level 3. Laporan penilaian mandiri maturitas SPIP Kecamatan Kembang Janggut telah disusun sesuai dengan kertas kerja yang dibuat. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “Terdefinisi” pada tingkat level 3 (tiga) dengan perolehan nilai 3,944. Laporan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dapat dilihat pada link googledrive https://drive.google.com/drive/folders/1bw-6Ypo6RhZNhSsatxv8Yv-uAHk_ZGDQ untuk indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **100%**, dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

23) Indikator Kinerja Tambahan B19 (Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah)

Target kinerja indikator tambahan ke-19 pada tahun 2024 yaitu memperoleh predikat/nilai sebesar Baik(B)/60-70. Untuk indokator tata kelola arsip perangkat daerah. Kecamatan Kembang Janggut memperoleh predikat/nilai Baik(B)/66,27 dari hasil audit tim tata kelola arsip perangkat

daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Walaupun sudah tercapai target kinerja akan tetapi masih ada beberapa hambatan yaitu karena kurangnya sumber daya manusia yang ada pada kantor camat Kembang Janggut, tidak adanya pegawai sebagai arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan masih kurang seharusnya bisa dilaksanakan secara berkala, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip. Kedepannya Kecamatan Kembang Janggut akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bagaimana Standar (SOP) dalam pengelolaan arsip dengan baik dan benar pada perangkat daerah.

24) Indikator Kinerja Tambahan B20 (Nilai SAKIP Perangkat Daerah)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-20 tahun 2024 yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 70. Hasil evaluasi implementasi SAKIP Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh nilai 76,83 dengan kategori BB dan dapat diinterpretasikan Sangat Baik, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Pada Indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar **103,82%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi.**

Dari hasil diatas terdapat catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

   Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

   - Dokumen Perjanjian Kinerja belum mengacu/selaras dengan Renstra.

- Dokumen cascading yang telah disusun belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 89 Tahun 2021, yailu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Dokumen perencanaan kinerja belum ditetapkan dari analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

   Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

   - Dokumen IKU belum ada definisi operasionalnya atau penjelasan atas indikator lKU.

3. Pelaporan Kinerja

   Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

   - Belum ada dokumen reviu atas Laporan Kinerja.
   - Laporan kinerja belum digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kineria lntemal

   Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

   - Belum seluruhnya rekomendasi atas LHE AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, ada beberapa rekomendasi yang menjadi dasar atas perbaikan yaitu:

1. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen cascading dengan mengacu pada Permenpan 89 Tahun 2O21, yaitu mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga penjenjangan kinerja tersebut memenuhi prinsip logis

yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

2. Memberikan definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja yang ada di dokumen IKU.
3. Membentuk tim internal untuk melakukan reviu atas laporan kinerja dengan memastikan bahwa laporan kinerja telah sesuai dengan format laporan kinerja yang ada di Permenpan 53 tahun 2014.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.
5. Membuat matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP dan membuat laporan atas tindak lanjut yang disertai dengan menguraikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk menindaklanjuli rekomendasi tersebut.

Selanjutnya capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Tambahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 dari sasaran ke-21 sampai dengan sasaran ke-41 bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.24.
Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2024
Sasaran ke-21 sampai dengan ke-41

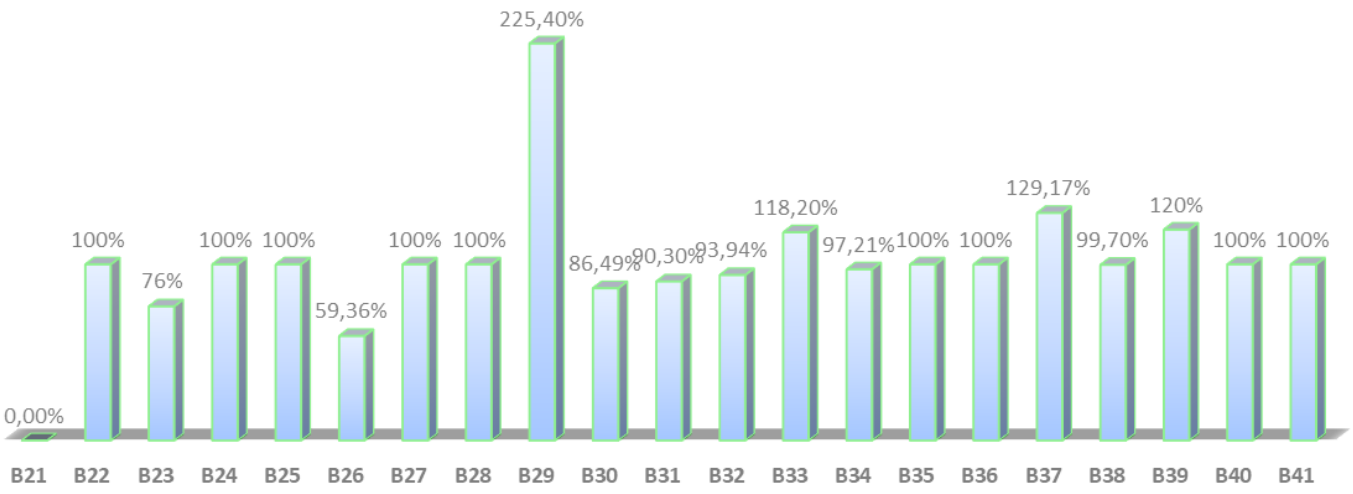

25) Indikator Kinerja Tambahan B21 (Prestasi Inovasi Perangkat Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-21 yaitu prestasi inovasi perangkat daerah atau Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah sebanyak 1 (satu) inovasi. Untuk tahun 2024 Kecamatan Kembang Janggut tidak membuat atau mengusulkan inovasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 0% dengan predikat Sangat Rendah. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM dalam membuat dan menjalankan Inovasi yang diajukan.

26) Indikator Kinerja Tambahan B22 (Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor)

Indikator kinerja tambahan ke-22 yaitu tindak lanjut atas pengaduan SP4N Lapor yang disampaikan melalui website aplikasi https://www.lapor.go.id. Untuk tahun 2024 Kecamatan Kembang Janggut tidak ada aduan yang masuk pada Pemerintah Daerah. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Berikut laporan atas aduan yang masuk pada Kecamatan Kembang Janggut bisa dilahat pada gambar berikut :

Gambar 3.3. Penyampaian Laporan LKjIP Tahun 2024

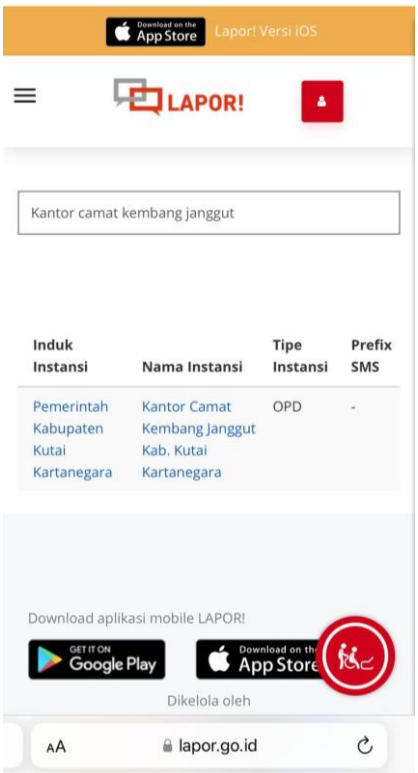

27) Indikator Kinerja Tambahan B23 (Pengamanan Aset Tanah)

Indikator kinerja tambahan ke-23 yaitu pengamanan aset tanah sebanyak 75%, Aset tanah yang tercatat dalam SIMDA BMD Kecamatan Kembang Janggut yaitu sebanyak 19 bidang tanah yang dikuasai. Dari semua bidang tanah yang tercatat pada Kecamatan Kembang Janggut telah dipasangi patok dan plang tanah milik pemerintah daerah, sebagian ada yang sudah diberi pagar kayu, dan ada 1 bidang tanah yang bersertifikat. Realisasi yang didapat berdasarkan persentase capaian sesuai perhitungan dalam kertas kerja komponen pengamanan aset tanah oleh bidang Aset BPKAD Tahun 2022 dan belum ada update penghitungan terbaru. Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa belum maksimalnya pengamanan aset tanah yang dikuasai oleh Kecamatan Kembang Janggut, sehingga realisasi yang didapat hanya 57,11%, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **76,15%** dengan predikat **Tinggi**.

28) Indikator Kinerja Tambahan B24 (Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-24 tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari Persentase kelengkapan berkas atas penggunaan barang milik daerah oleh pejabat struktural yang ada. Pelaksanaan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah, dan terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari berita acara pinjam pakai dan pakta integritas penggunaan BMD yang terdata lengkap sesuai dengan jumlah BMD yang digunakan. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%**, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

29) Indikator Kinerja Tambahan B25 (Jumlah program pengentasan kemiskinan)

Indikator kinerja tambahan ke-25 yaitu dengan sasaran jumlah program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 melaksanakan

kegiatan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dengan tujuan yaitu :

- Mengidentifikasi keluarga yang miskin atau rentan
- Memberikan bantuan kepada keluarga yang miskin atau rentan
- Membantu mengurangi beban, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan

Kegiatan P3KE dilaksanakan diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya adalah Kecamatan Kembang Janggut, dengan adanya kegiatan tersebut maka target program pengentasan kemiskinan tercapai,sehingga capaian kinerja yang diperoleh oleh Kecamatan Kembang Janggut untuk indikator tambahan ke-25 ini sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

30) Indikator Kinerja Tambahan B26 (Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional)

Indikator kinerja tambahan ke-26 yaitu prevalensi stunting dikabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target nasional yaitu 14%. Pada Tahun 2024 diperoleh nilai stunting untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 19,69%. Pada indikator ke-26 ini menggunakan kriteria penilaian Tingkat realisasi negative, semakin besar nilainya maka semakin rendah capaian kinerjanya. Hasil perhitungan prevalensi stunting adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja prevalensi stunting yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2024 yaitu

$$= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{14 - (19{,}69 - 14)}{14} \times 100$$

$$= 59{,}36\ \%$$

Dari hasil perhitungan capaian kinerja maka diperoleh nilai **59,36%** dengan predikat **Rendah**. Untuk prevalensi stunting tahun 2024 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8. Laporan Tahunan Status Gizi Balita Tahun 2024

No.	Puskesmas	Ditimbang	Diukur TB	Diukur TB dan BB	Stunting	Wasting	Underweight	% stunting	% Wasting	% underweight
1.	SAMBOJA	1.132	1.131	1.131	232	87	177	20,51	7,69	15,64
2.	SUNGAI MERDEKA	2.378	2.377	2.377	303	225	378	12,75	9,47	15,9
3.	HANDIL BARU	1.486	1.484	1.483	257	127	210	17,32	8,56	14,13
4.	MUARA JAWA	2.381	2.381	2.381	200	104	244	8,4	4,37	10,25
5.	SANGA-SANGA	1.320	1.320	1.319	299	101	231	22,65	7,66	17,5
6.	LOA JANAN	1.398	1.400	1.398	116	71	127	8,29	5,08	9,08
7.	BATUAH	778	779	779	72	7	53	9,24	0,9	6,81
8.	LOA DURI	1.958	1.955	1.957	271	98	172	13,86	5,01	8,78
9.	LOA KULU	2.311	2.310	2.310	239	109	235	10,35	4,72	10,17
10.	JONGGON JAYA	1.043	1.043	1.042	68	27	127	6,52	2,59	12,18
11.	MUARA MUNTAI	1.245	1.245	1.245	387	101	260	31,08	8,11	20,88
12.	MUARA WIS	616	616	615	213	56	156	34,58	9,11	25,32
13.	KOTA BANGUN	1.350	1.351	1.350	178	117	250	13,18	8,67	18,52
14.	RIMBA AYU	1.009	1.009	1.008	140	68	137	13,88	6,75	13,58
15.	MANGKURAWANG	1.561	1.561	1.561	319	118	253	20,44	7,56	16,21
16.	RAPAK MAHANG	1.563	1.563	1.563	298	103	205	19,07	6,59	13,12
17.	LOA IPUH	1.177	1.167	1.173	182	72	146	15,6	6,14	12,4
18.	SEBULU I	1.759	1.759	1.759	267	138	328	15,18	7,85	18,65
19.	SEBULU II	1.166	1.167	1.163	190	51	142	16,28	4,39	12,18
20.	SEPARI III	1.775	1.775	1.775	156	119	253	8,79	6,7	14,25
21.	TELUK DALAM	2.642	2.640	2.642	391	179	349	14,81	6,78	13,21
22.	SUNGAI MARIAM	2.425	2.425	2.420	353	135	281	14,56	5,58	11,59
23.	MUARA BADAK	1.694	1.694	1.693	221	99	191	13,05	5,85	11,28
24.	BADAK BARU	997	997	997	40	29	65	4,01	2,91	6,52
25.	MARANG KAYU	1.514	1.514	1.514	66	24	91	4,36	1,59	6,01
26.	PERANGAT	686	686	686	61	27	55	8,89	3,94	8,02
27.	MUARA KAMAN	1.345	1.346	1.341	285	116	229	21,17	8,65	17,03
28.	BUNGA JADI	1.386	1.386	1.386	271	113	237	19,55	8,15	17,1
29.	KAHALA	726	726	726	171	44	155	23,55	6,06	21,35
30.	KEMBANG JANGGUT	1.356	1.356	1.355	267	158	217	19,69	11,66	16
31.	TABANG	398	398	398	37	20	23	9,3	5,03	5,78
32.	RITAN BARU	468	468	466	41	13	33	8,76	2,79	7,05
	KABUPATEN	**45.043**	**45.029**	**45.013**	**6.591**	**2.856**	**6.010**	**14,64**	**6,34**	**13,34**

31) Indikator Kinerja Tambahan B27 (Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender)

Indikator kinerja tambahan ke-27 yaitu ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender dengan target 100%. Penganggaran pengarusutamaan gender adalah pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada tahun 2024 didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kembang Janggut terdapat alokasi penganggaran untuk kegiatan yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

32) Indikator Kinerja Tambahan B28 (Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%)

Indikator kinerja tambahan ke-28 yaitu terkait pengendalian inflasi dimana pemerintah daerah menargetkan agar angka inflasi tetap berada dirange normal yaitu 1,5% sampai 3,5%. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti permintaan yang lebih besar dari penawaran, defisit anggaran, dan kenaikan harga barang impor.

Perhitungan inflasi menggunakan ratusan komoditas yang dihitung, dengan terbatasnya anggaran dan sampel yang digunakan untuk perhitungan inflasi maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan pendekatan yang namanya proxy inflasi atau dengan kata lain Indeks Perkembangan Harga (IPH).

IPH (Indeks Perkembangan Harga) adalah proxy inflasi yang menggambarkan perkembangan harga bahan pangan. Tujuan dari penghitungan IPH yaitu :

- IPH merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).
- IPH diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam "**Mengendalikan Inflasi"** dan menjaga kestabilan harga bahan pangan.
- IPH dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan harga bahan pangan dan mengantisipasi inflasi.

Dari hasil perhitungan IPH (Indeks Perkembangan Harga) di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024 pada perbandingan Year On Year (dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya) dapat dilihat dari bulan januari sampai dengan bulan desember seluruhnya berada dalam range normal (1,5% - 3,5%). Jadi, untuk indikator ke-28 ini dapat dikatakan target tercapai **100%** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Tinggi.**

Resume IPH (Indeks Perkembangan Harga) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat dilihat pada infografis dibawah ini :

Gambar 3.4.

Indeks Perkembangan Harga Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

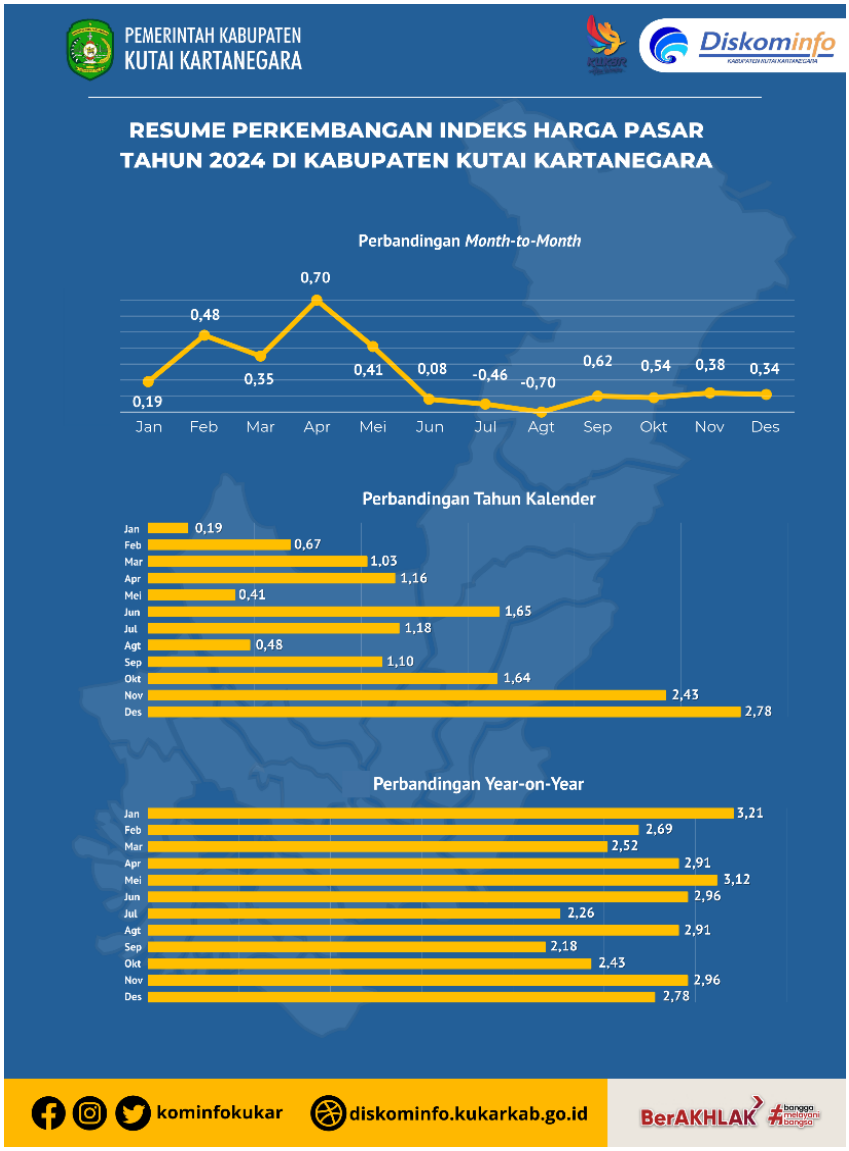

Sumber : Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

33) Indikator Kinerja Tambahan B29 (Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan)

Indikator kinerja tambahan ke-29 yaitu persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaporkan P3DN. Target yang harus dicapai yaitu 40%,. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh Kecamatan Kembang Janggut realisasi PDN terhadap komitmen sebesar 90,16% dari target 40% dengan capaian kinerja sebesar **225,40%** atau dengan predikat **Sangat Tinggi.**

34) Indikator Kinerja Tambahan B30 (Nilai LPPD)

Indikator kinerja tambahan ke-30 yaitu nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan target sebesar 3,6. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 3,115 dengan status Sedang. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **86,49%** dari target yang ada dengan predikat **Tinggi.**

35) Indikator Kinerja Tambahan B31 (Nilai SAKIP Pemerintah Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-31 yaitu nilai SAKIP Pemerintah Daerah dengan target nilai 73. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2024, nomor B/417/AA.05/2024 tanggal 03 september 2024, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat nilai 65,92 dengan predikat B (Baik) yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama , namun masih perlu adanya Upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja yang diperoleh yaitu sebesar **90,30%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

36) Indikator Kinerja Tambahan B32 (Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-32 yaitu Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan target sebesar 64. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, Nomor B/346/RB.06/2024 tanggal 01 februari 2024, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 60,12 dengan kategori B. Dari hasil ini diperoleh capaian kinerja sebesar 93,94% predikat **Sangat Tinggi.**

37) Indikator Kinerja Tambahan B33 (Indeks Inovasi Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-33 yaitu indeks inovasi daerah dengan target 49,57. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tanggal 03 desember 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai/ skor indeks sebesar 58,59 dengan predikat

inovatif. Jadi, untuk indikator tambahan ini diperoleh capain kinerja sebesar 118,20% dengan predikat **Sangat Tinggi.**

38) Indikator Kinerja Tambahan B34 (Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-34 yaitu indeks pelayanan publik pemerintah daerah dengan target 8,95 yang tertuang didalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah tahun 2024 tanggal 31 desember 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai IPP Kabupaten sebesar 4,35 dengan predikat A-. Dari hasil realisasi dan target terjadi perbedaan penggunaan skala maksimal pada penilaian. Untuk target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menggunakan skala nilai maksimal 10 sedangkan untuk penilaian dari pemerintah pusat menggunakan skala nilai maksimal 5. Jadi, nilai IPP Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula 4,35 akan dikonversikan menjadi 8,70 dengan predikat A- dengan capaian kinerja sebesar **97,21%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

39) Indikator Kinerja Tambahan B35 (Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-35 yaitu nilai kepatuhan standar pelayanan pemerintah daerah dengan target berada di Zona Hijau. Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tanggal 01 november 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 94,46 pada Zona Hijau dengan kategori A dan Opini Kualitas Tertinggi. Jadi, untuk indikator tambahan ini diperoleh realisasi kinerja pada zona hijau sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga capaian kinerja bisa dikatakan **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

40) Indikator Kinerja Tambahan B36 (Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau)

Indikator kinerja tambahan ke-36 yaitu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran, pada indikator ini di kantor Kecamatan sudah tersedia ruangan dengan bebas asap rokok, dimana telah dibuatnya surat edaran camat dan plang untuk kawasan bebas asap rokok diruang perkantoran. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

Gambar 3.5.

SE Dan Plang Ruangan Bebas Asap Rokok

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Jl. Seman No. 001 RT. 001 Telp. IP Phone Email : kembangjanggutkukarkab.go.id
KEMBANG JANGGUT (7557)

SURAT EDARAN
Nomor :B.084/PEL-UM-KJ/100.3.4/2/2024
Tentang : Larangan Merokok di Ruangan kantor Camat Kembang Janggut

Kepada
YTH : Seluruh Aparatur Sipil Segara (ASN) dan Pegawai Non ASN dilingkungan Kantor Camat Kembang Janggut

Di -
Tempat

Sehubungan dengan upaya menciptakan lingkungan yang sehat,bersih,dan bebas dari asap rokok,maka dengan ini saya mengeluarkan edaran sebagai berikut :

1. Dilarang merokok dalam ruangan
2. Setiap pegawai wajib mematuhi aturan ini demi menjaga kesehatan bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta produktif
3. Bagi yang melanggar ketentuan ini,akan diberi teguran dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
4. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kembang janggut
Pada Tanggal : 20 Februari 2024
Plt.CAMAT KEMBANG JANGGUT
SUHARTONO,S.KM
PEMBINA
NIP.19810217 200801 1 014

41) Indikator Kinerja Tambahan B37 (IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar))

Indikator kinerja tambahan ke-37 yaitu indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kembang Janggut dengan target skor 70 di tahun 2024 ini. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. SKM dilakukan dengan membandingkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada aplikasi survey kukar untuk nilai SKM Kecamatan Kembang Janggut

pada tahun 2024 di semester ini mendapat skor 90,42. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi capaian kinerja sebesar **129,17%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

42) Indikator Kinerja Tambahan B38 (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Indikator kinerja tambahan ke-38 yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, pada indikator ini memiliki target 73,81 untuk tahun 2024. Berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, nomor B-1164/DLHK/Set/00.8.6/12/2024 tanggal 09 desember 2024 perihal penyampaian IKK Outcome Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didapat skor 73,59. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi capaian kinerja sebesar **99,70%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

43) Indikator Kinerja Tambahan B39 (Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-39 yaitu capaian indikator kinerja utama pada perangkat daerah, Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kembang Janggut ada 4 indikator sasaran yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Dari hasil perhitungan realisasi kinerja terhadap target didapat hasil :

- Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti didapat hasil capaian kinerja 100%
- Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum didapat hasil capaian kinerja 125%
- Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa didapat hasil capaian kinerja 254%, dan
- Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan didapat hasil capaian kinerja 0%

Capaian ke-4 IKU Kecamatan Kembang Janggut :

$$= \frac{\text{Jumlah Capaian IKU1 s. d IKU4}}{4} \times 100\%$$

$$= \frac{100 + 125 + 254 + 0}{4} \times 100$$

$$= 119{,}75\ \%$$

Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi capaian kinerja sebesar **119,75%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

44) Indikator Kinerja Tambahan B40 (Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-40 yaitu laporan pemetaan kemapuan mengaji ASN perangkat daerah dengan target 1 laporan. Pada tahun 2024 Kecamatan Kembang Janggut telah melaksanakan kegiatan Gerakan Etam Mengaji yang diikuti hampir seluruh ASN Kantor Camat Kembang Janggut. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh hasil pemetaan kemampuan mengaji ASN Kantor Camat Kembang Janggut sebagai berikut :

- Lancar dan Mahir sebanyak 3 Orang (10,71%) ASN dapat membaca Al quran secara lancar dan baik sesuai dengan hukum tajwid dan fashahah.
- Lancar Kurang Mahir sebanyak 2 Orang (7,14 %) ASN Dapat membaca Al Quran secara lancar namun masih terdapat kesalahan kesalahan secara khofi dalam hukum tajwid.
- Kurang lancar sebanyak 3 Orang (10,71 %) Dapat membaca Al Quran namun masih melanggar hukum-hukum tajwid baik secara jali maupun khafi.S
- Tidak Lancar sebanyak 2 Orang (7,14%) Membaca Al Quran secara terbata bata, dan
- Tidak Dapat membaca Al quran : 18 Orang (64,28 %) Tidak bisa membaca Al Quran

Laporan hasil pemetaan kemampuan mengaji ASN telah disusun dan disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

45) Indikator Kinerja Tambahan B41 (SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah)

Indikator kinerja tambahan ke-41 yaitu surat keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) perangkat daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, nomor :

118/BAZNAS-KUKAR/I/III/2023 tanggal 27 maret 2023 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kembang Janggut Kabuoaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2023-2028 maka dengan ini untuk sasaran kinerja SK Pembentukan UPZ sudah terbentuk dan berjalan hingga sekarang. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi.**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Target Indikator Tujuan Kecamatan Kembang Janggut yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Camat Kembang Janggut tahun 2024 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar **90,42%.** Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) dengan nilai indeks kepuasan sebesar **89,01%**. Terjadi kenaikan realisasi sebesar **1,41%.** Akan tetapi jika dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar **129,17%** sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar **127,16%**. Ini terjadi peningkatan perolehan capaian kinerja sebesar **2,01%**. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Kembang Janggut terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan yang sering terjadi yaitu hilangnya jaringan komunikasi dan internet yang ada serta adanya pemadaman listrik yang cukup sering terjadi akibat dari faktor alam seperti hujan dan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kembang Janggut mengakibatkan jaringan listrik ada yang putus akibat tertimpa pohon tumbang dan lain sebagainya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.9.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	2020	60	80,68	-	134,47%	-
				2021	65	86,74	Meningkat	133,45%	Menurun
				2022	70	86,41	Menurun	123,44%	Menurun
				2023	70	89,01	Meningkat	127,16%	Meningkat
				2024	70	90,42	Meningkat	129,17%	Meningkat

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Grafik 3.25. Perbandingan Realisasi Nilai IKM

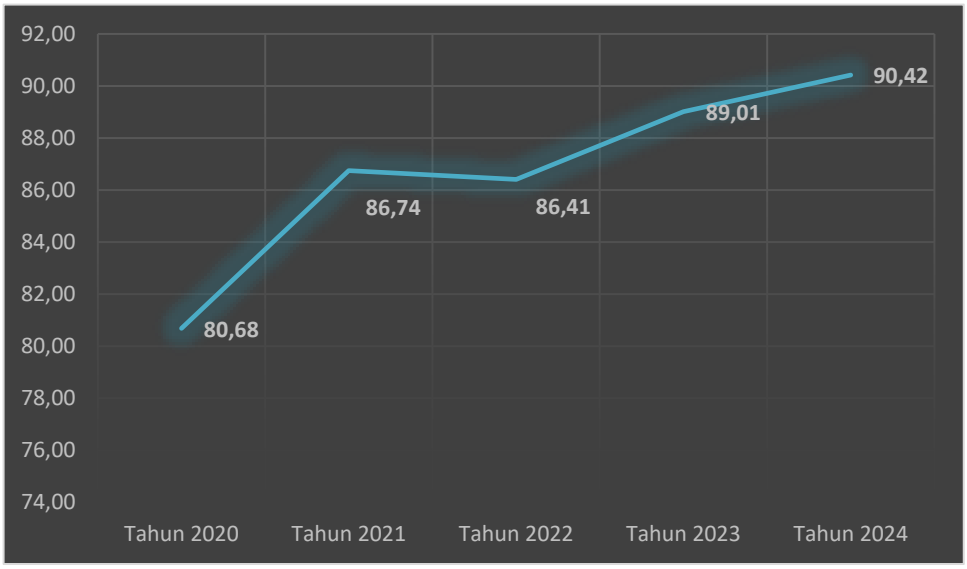

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kantor Camat Kembang Janggut tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit peningkatan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Kembang Janggut pada tahun 2024 ini dan ada juga 41 (empat puluh satu) indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai

dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan Realisasi
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
A	**Indikator Kinerja Utama**										
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100	143%	80	100	125%	Tetap
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	7	112,43	1606%	10	25,40	254%	Menurun
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	2	0	0%	3	0	0%	Tetap
B	**Indikator Kinerja Tambahan**										
1	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	B1	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		B2	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	84,85	84,85%	Menurun
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	B3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan Realisasi
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	B4	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	B5	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
5	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	B6	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	B7	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	0	0%	100	0	0%	Tetap
7	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	B8	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	B9	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan Realisasi
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	B10	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B11	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B12	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1	1	100%	1	1	100%	Tetap
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	B13	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
13	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	B14	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	B15	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
15	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	B16	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	96,38	137,69%	70	90,76	129,66%	Menurun

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan Realisasi
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
16	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	B17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
17	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B18	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	Level 3	4,365	100%	Level 3	3,944	100%	Menurun
18	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B19	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	Baik (B) 60-70	61,60	100%	Baik (B) 60-70	66,27	100%	Meningkat
19	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	74	91,30	123,38%	74	76,83	103,82%	Menurun
20	Peningkatan Prestasi Inovasi	B21	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	0	0%	100	0	0%	Tetap
21	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
22	Meningkatnya Pengamanan Aset	B23	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	57,11	76,15%	75	57,11	76,15%	Tetap
23	Meningkatnya Tata Kelola Aset	B24	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
24	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	B25	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100%	1	1	100%	Tetap
25	Menurunnya Prevalensi Stunting	B26	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	16,5	23	60,61%	14	19,69	59,36%	Meningkat
26	Pengarusutamaan Gender	B27	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
27	Pengendalian Inflasi	B28	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	*)	0	0%	100	100	100%	Meningkat

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan Realisasi
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	B29	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	*)	0	0,00%	40	90,16	225,40%	Meningkat
29	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B30	Nilai LPPD	Nilai	*)	2,42	0,00%	3,6	3,1135	86,49%	Meningkat
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B31	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	70	67,86	96,94%	73	65,92	90,30%	Menurun
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B32	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	63	62,74	99,59%	64	60,12	93,94%	Menurun
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	B33	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	*)	0	0,00%	49,57	58,59	118,20%	Meningkat
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	B34	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,9	8,48	95,28%	8,95	8,70	97,21%	Meningkat
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	B35	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100%	Zona Hijau	Zona Hijau	100%	Tetap
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	B36	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
36	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	B37	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	70	89,01	127,16%	70	90,42	129,17%	Meningkat
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	B38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,47	72,41	98,56%	73,81	73,59	99,70%	Meningkat

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan Realisasi
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	B39	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	462,25	462,25%	100	119,75	119,75%	Menurun
39	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	B40	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	*)	0	0%	1	1	100%	Meningkat
40	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	B41	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100%	1	1	100%	Tetap

***) Data Tidak Tersedia**
Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Dari tabel realisasi kinerja diatas antara realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023) dapat kita lihat perbandingan pencapaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 baik itu indikator kinerja utama yang terdiri dari 4(empat) indikator dan indikator kinerja tambahan sebanyak 40 (empat puluh) indikator. Dari ke 45 (empat puluh lima) indikator yang menjadi target kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 terdapat :

- 8 (delapan) Indikator sasaran yang realisasinya menurun,
- 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran realisasinya tetap, dan
- 10 (sepuluh) indikator yang realisasinya meningkat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Kembang Janggut sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Kecamatan Kembang Janggut (Renstra PD) adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
A	**Indikator Kinerja Utama**							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	15	25,4	169%	Sangat Tinggi
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	5	0	0%	Sangat Rendah
B	**Indikator Kinerja Tambahan**							
1	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	B1	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		B2	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	84,85	85%	Tinggi
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	B3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	B4	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	B5	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 / bulan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
5	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	B6	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	B7	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
7	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	B8	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	B9	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	B10	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B11	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B12	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	B13	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
13	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	B14	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	B15	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
15	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	B16	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	80	90,76	113%	Sangat Tinggi
16	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	B17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
17	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B18	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	Level 3	3,944	100%	Sangat Tinggi
18	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B19	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	Baik (B) 60-70	66,27	100%	Sangat Tinggi
19	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	78	76,83	99%	Sangat Tinggi
20	Peningkatan Prestasi Inovasi	B21	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah
21	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Pengamanan Aset	B23	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	57,11	76%	Tinggi
23	Meningkatnya Tata Kelola Aset	B24	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
24	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	B25	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi
25	Menurunnya Prevalensi Stunting	B26	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	19,69	59,36%	Rendah
26	Pengarusutamaan Gender	B27	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
27	Pengendalian Inflasi	B28	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	B29	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	90,16	225%	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B30	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,1135	86%	Tinggi
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B31	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	80,01	65,92	82%	Tinggi
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B32	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	70,02	60,12	86%	Tinggi

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	B33	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118%	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	B34	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	9,05	8,7	96%	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	B35	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100%	Sangat Tinggi
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	B36	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
36	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	B37	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	85	90,42	106%	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	B38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	74,51	73,59	99%	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	B39	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	119,75	120%	Sangat Tinggi
39	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	B40	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100%	Sangat Tinggi
40	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	B41	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100%	Sangat Tinggi
			Rata - Rata				**96,02%**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat capaian realisasi kinerja Kecamatan Kembang Janggut terhadap target akhir rencana strategis (renstra) Kecamatan Kembang Janggut tahun 2026 secara keseluruhan mendapat rata-rata kriteria penilaian sangat tinggi, walaupun ada beberapa indikator yang masih sangat rendah kriteria penilaiannya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Kembang Janggut (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi NIlai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.

Realisasi target kinerja **Tujuan** Kecamatan Kembang Janggut pada semester 2 tahun 2024 yaitu sebesar **90,42**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Baik,** hasil ini tentunya masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Kembang Janggut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan nilai IKM yang ada pada kecamatan lain di wilayah Indonesia untuk tahun 2024 di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai IKM sebesar **98,77** dengan predikat **Sangat Baik.** Link web Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 https://www.krian.sidoarjokab.go.id/template-1/001/1733799273

Grafik 3.26.
Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Kembang Janggut Dengan Kecamatan Lain Tahun 2024

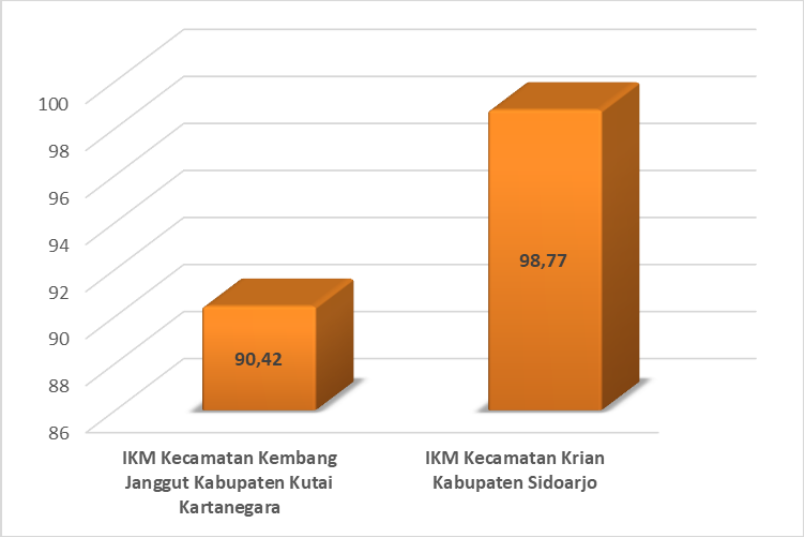

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perangkat daerah yang ada. Pada tahun 2024 ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
A	**Indikator Kinerja Utama**							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	SOP, Jaringan internet yang memadai	Tidak Ada Kendala
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	100	125%	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri	Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	10	25,40	254%	Adanya Kemitraan Dengan Pihak Lain Selain BUMDES, SDA Yang Tersedia, dan Akses Insfrastruktur yang cukup baik	Kurangnya SDM yang kompeten, Pemanfaatan Potensi Desa yang minim, Akses Insfrastruktur terbatas, Kekurangan modal untuk pengembangan usaha Desa, Tingkat partisipasi masyarakat dibidang usaha rendah, dan Ketergantungan pada dana pihak lain (DD, ADD)
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	3	0	0%	Tidak Ada	Karena Adanya Peralihan Kewenangan Yang Dllaksanakan Oleh Kecamatan Yaitu Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Dllaksanakan Oleh DMPTSP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
B	**Indikator Kinerja Tambahan**							
1	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100%	Seluruh Pejabat Struktural Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu	Tidak Ada Kendala
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	84,85	84,85%	Dari 33 ASN ada 5 ASN Yang Melaporkan SPT Tahunannya Diatas Bulan Maret	Tidak Ada Kendala
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	SKP Seluruh Pegawai Telah Dilaporkan Dan Dibuat Di Aplikasi E-Kinerja	Tidak Ada Kendala
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Input Pada Aplikasi SIRUP Telah 100% dan Dilaksanakan Sesuai Jadwal	Tidak Ada Kendala
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100%	Proses Input dan Pelaporan Dilaksanakan Tepat Waktu	Sebagian Bukti Dukung Yang Disampaikan Ada Yang Tidak Sesuai
5	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100	100	100%	Usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Telah Disampaikan dan Sesuai Dengan BMD Yang Di Adakan	Tidak Ada Kendala
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	0	0%	Tidak Ada	Tidak Ada Usulan Yang Disampaikan Melalui Aplikasi Sehingga Target Kinerja Tidak Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
7	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	LKjIP Disampaikan Tepat Waktu, dan Di Upload Pada Aplikasi Sakipkukar dan E-Sakip Menpan	Tidak Ada Kendala
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Laporan Keuangan Disampaikan Sebelum Tanggal Yang DiTetapkan	Tidak Ada Kendala
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100%	Laporan SKM dan RTL Disampaikan Sesuai Jadwal Yang Ditentukan	Tidak Ada Kendala
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Telah Disampaikan, dan Ditindaklanjuti sesuai Hasil Pelaksanaan	Tidak Ada Kendala
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1	1	100%	Hasil Temuan Telah Ditindak Lanjuti dan Dilaporkan Ke Inspektorat dan BPKP Provinsi	Tidak Ada Kendala
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100%	Laporan SPIP Telah Dibuat dan Disampaikan Tepat Waktu	Tidak Ada Kendala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
13	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100%	Perangkat Daerah dan Seluruh ASN Telah Melaksanakan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Tidak Ada Kendala
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100%	Perjanjian Kinerja Telah Disusun dan Disampaikan Dengan Tepat Waktu	Tidak Ada Kendala
15	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	90,76	129,66%	Serapan Anggaran Telah Dilaksanakan dan Direalisasikan Sesuai SPD Yang Terbit	Tidak Ada Kendala
16	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100	100	100%	Adanya Inspektorat Yang Melakukan Pembinaan Dalam Pelaporan Manajemen Risiko	Sebagian Pejabat Pemilik UPR Masih Belum Terlalu Paham Akan Pelaporan Manajemen Risiko, Perlu Adanya Pendampingan Lebih Lanjut
17	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	Level 3	3,944	100%	Ketersediaan Bukti Dukung Yang Akurat dan Sesuai Dengan Kriteria Penilaian SPIP	Tidak Ada Kendala
18	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	Baik (B) 60-70	66,27	100%	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Arsip	Masih Terbatasnya SDM Untuk Jabatan Arsiparis
19	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	74	76,83	103,82%	Ketersiedaan Bukti Dukung Yang Sesuai Dengan Kriteria Penilaian Sakip	Tidak Ada Kendala
20	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	0	0%	Tidak Ada	Terbatasnya SDM dalam Membuat dan Menjalankan Inovasi Yang Diajukan
21	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	Tidak Ada Aduan Yang Masuk Dalam Aplikasi SP4N Lapor	Tidak Ada Kendala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
22	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	57,11	76,15%	Aset Tanah Telah Dilakukan Pengamanan Dengan Pemasangan Plang dan Patok Yang Jelas dan Realisasi Berdasarkan Persentase Capaian Sesuai Perhitungan Dalam Kertas Kerja Komponen Pengamanan Tanah Oleh Bidang Aset BPKAD Tahun 2022	Tidak Ada Kendala
23	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100%	Pakta Integritas dan BA Pinjam Pakai Aset Tersedia Pada Setiap Pejabat Yang Menggunakan Aset/ BMD	Tidak Ada Kendala
24	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100%	Terlaksananya Fasilitasi Program P3KE Pada Kecamatan Kembang Janggut	Tidak Ada Kendala
25	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	19,69	59,36%	Adanya Program Pemberian Makanan Bergizi	Masih Kurangnya Saranan Dan Prasarana Kesehatan
26	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100%	Penganggaran Pengarusutamaan Gender Tersedia Pada 3 Program Di Kecamatan	Tidak Ada Kendala
27	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100%	Laporan Perkembangan Harga / Indeks Harga Pasar Tersedia Pada Diskominfo	Tidak Ada Kendala
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	90,16	225,40%	Tidak Ada	Tidak Ada Kendala
29	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,1135	86,49%	Laporan Tersedia Pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	Tidak Ada Kendala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30%	Laporan Tersedia Pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	Tidak Ada Kendala
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,94%	Laporan Tersedia Pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	Tidak Ada Kendala
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,20%	Laporan Tersedia Pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	Tidak Ada Kendala
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	8,70	97,21%	Laporan Tersedia Pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	Tidak Ada Kendala
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100%	Laporan Tersedia Pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	Tidak Ada Kendala
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100%	Telah Dibuatnya Surat Edaran Camat dan Plang Untuk Kawasan Bebas Asap Rokok Diruang Perkantoran	Tidak Ada Kendala
36	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	70	90,42	129,17%	Adanya Aplikasi Survey Kukar Sehingga Memudahkan Dalam Pelaksanaan Survey	Tidak Ada Kendala
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,81	73,59	99,70%	Laporan Tersedia Pada DLHK	Tidak Ada Kendala
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	119,75	119,75%	Bukti Dukung Tersedia Sesuai Dengan Target Yang Diminta	Tidak Ada Kendala
39	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100%	Laporan Tersedia atas Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji Di Perangkat Daerah	Tidak Ada Kendala

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat/ Gagalnya Capaian Kinerja
40	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100%	SK Sudah Tersedia	Tidak Ada Kendala
		Rata - Rata				**99,84%**		

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kembang Janggut tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Capaian Sasaran Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	119,75%	109,23%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.744.684.000	8.563.193.519	97,92%	Efisien

No	Sasaran	Capaian Sasaran Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100%						
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97%						
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	100%						
37	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	129%						
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	92,50%	97,72%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.560.119.750	6.236.304.804	82,49%	Efisien
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	100%						
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	100%						
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	100%						
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	100%						
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	0%						
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	100%						
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	100%						

No	Sasaran	Capaian Sasaran Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	100%						
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%						
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	100%						
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	100%						
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja - ke Pelaksana	100%						
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	130%						
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	100%						
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%						
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	100%						
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	104%						
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	0%						
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	76%						
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	100%						
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	225%						

No	Sasaran	Capaian Sasaran Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
30	Meningkatnya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	86%						
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90%						
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	94%						
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	118%						
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	100%						
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	120%						
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	100%	93,18%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	499.572.872	445.739.000	89,22%	Efisien
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	100%						
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	59%						
27	Pengarusutamaan Gender	100%						
28	Pengendalian Inflasi	100%						
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	100%						
40	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	100%	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	350.000.000	324.105.000	92,60%	Efisien
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	100%						
	Jumlah		**100,03%**		**17.154.376.622**	**15.569.342.323**	**90,76%**	**Efisien**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 41 sasaran yang terbagi dari 4 Program menunjukkan pencapaian dengan efisien, ini karena kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kembang Janggut mencapai 100%, atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100%	SOP Tersedia dan Jaringan internet yang memadai	Tidak Ada
		Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	86,36	100%	Koordinasi Forkopimcam Dengan Pihak Swasta dan Instansi Terkait Terlaksana Dengan Baik Sehingga Proses Perbaikan Jalan Yang Rusak Dapat Segera Diperbaiki	Rusaknya Jalan Akibat Bencana Alam (Banjir) Sehingga Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Menurun
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100%	Tingkat Antusias Warga Yang Cukup TInggi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakart Desa Dari Instansi Terkait

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	76,83	104%	Data Realisasi dan Pendukung Yang DIbutuhkan Dalam Pelaporan Tersedia	Kurangnya Pengarsipan Berkas Secara Berkala, Sehingga Ada Beberapa Data Dukung Yang Diminta Tidak Dapat Dipenuhi
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100%	Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Jadwal	Tidak Ada

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Berdasarkan tabel diatas seluruh program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kembang Janggut tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan, berikut penjelasan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dan kendala yang dihadapi adalah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target mendapat nilai BB(74) dan realisasi target di tahun 2024 mendapat penilaian sebesar 76,83. Target kinerja yang sudah ditentukan tercapai, dengan Capaian kinerja sebesar 104%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pejabat yang berkewajiban memberikan laporan tidak tepat waktu dalam pengisian dan pelaporannya serta kurangnya pengarsipan berkas secara berkala, sehingga ada beberapa data dukung yang diminta tidak dapat dipenuhi.

Dalam mempertahankan realisasi kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Kembang Janggut yaitu akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai kartanegara dan Bagian Organisasi dan tatalaksana Sekretariat Daerah tentang tata cara serta kelengkapan dokumen

yang harus dilengkapi agar tingkat kepatuhan dalam pelaporan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2024 yaitu Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100%. Ditahun ini target kinerja program tercapai sesuai target, ini dikarenakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kembang Janggut semuanya sudah sesuai SOP dan standar pelayanan publik. Hasil ini didapat dari hasil survey yang diadakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik itu perijinan atau pun non perijinan. Hasil survey diolah sesuai standar perhitungan Indeks Kepuasan masyarakat dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian.

Kendala yang dihadapi pun ada selama tahun 2024 yaitu hilangnya jaringan internet apabila terjadi pemadaman Listrik diwilayah Desa Kembang Janggut. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pengetahuan pejabat desa dan RT akan kelengkapan dokumen pendukung dalam mengurus perijinan dan non perijinan, sehingga masyarakat yang menerima pelayanan terhambat akibat tidak lengkapnya berkas yang diminta sesuai persyaratan yang ada. Dengan ini kedepannya akan diadakan sosialisasi kepada perangkat Desa dan RT untuk manajemen dan kelengkapan berkas administrasi dalam pengurusan perijinan dan non perijinan. Berikut jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bagian pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut selama tahun 2024 yaitu

Tabel 3.15.
LAPORAN PELAYANAN ADMINISTARSI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2024

No	Nama Layanan	Jenis Pelayanan		Bulan												Jumlah
		Perizinan	Non Perizinan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
01	Pelayanan Kasi Pemerintahan		Pembuatan KK	32	72	36	22	45	47	65	31	15	33	51	32	481
			Pembuatan KTP el / Biodata	80	37	28	23	0	58	76	58	43	61	56	40	560
			Pengantar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

No	Nama Layanan	Jenis Pelayanan		Bulan												Jumlah
		Perizinan	Non Perizinan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
			Pindah													
		SKPT		7	0	0	12	0	0	3	0	14	0	0	0	36
02	Pelayanan Kasi PMD		Legalisir Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembuatan Rekomendasi	2	2	8	8	5	2	2	14	2	4	4	12	65
		IZIN IMB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IZIN SIUP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Pelayanan Kasi Kesos	AK.I		21	21	24	9	20	39	25	22	28	0	0	15	224
04	Pelayanan Umum		Legalisir SKTM	4	0	1	1	8	4	4	4	3	2	4	0	35
			Legalisir Suket Ahli Waris	4	5	2	2	1	3	4	4	3	4	2	2	36
			Legalisir Suket Belum Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Legalisir Surat Kuasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			Legalisir Surat Domisili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Surat Keterangan Kematian	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	Pelayanan Kasi Tramtib dan Linmas	IUMK	Pengantar SKCK	0	23	21	15	75	55	30	28	38	43	43	53	424
			Suket Ijin Keramaian	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Jumlah			**173**	**169**	**120**	**92**	**154**	**208**	**209**	**161**	**146**	**148**	**161**	**154**	**1.895**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tahun 2024 yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif dengan target sebesar 100%. Target kinerja pada tahun ini tercapai sebesar 100% dikarenakan seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ada seperti PKK dan beberapa lembaga lainnya, semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK antara lain lomba-lomba, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh tim penggerak PKK yang ada di Desa serta melaksanakan kegiatan Program Pemberian

Makanan Bergizi (PMB). Dalam pelaksanaannya hambatan dan kendala pun ada yaitu kurangnya respon dan antusias warga desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Kembang Janggut dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditahun 2024 yaitu cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 100%. Target kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Memenuhi target dikarenakan seluruh desa mendapat predikat sangat baik.

Tabel 3.16.
Daftar Realisasi APBDes Tahun 2024
Per 30 Desember 2024

No.	Desa	APBDES TA 2024 (ADD, DD, BHPRD, BKKD RT, BANKEU PROVINSI,PADes)		% Realisasi	Predikat
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Genting Tanah	6.121.405.997	6.028.919.868	98,49%	Sangat Baik
2	Loa Sakoh	4.810.476.034	4.322.321.050	89,85%	Sangat Baik
3	Hambau	6.287.487.630	5.956.438.444	94,73%	Sangat Baik
4	Kembang Janggut	8.564.165.150	8.000.369.694	93,42%	Sangat Baik
5	Kelekat	5.498.201.400	4.699.275.310	85,47%	Sangat Baik
6	Pulau Pinang	4.839.843.145	3.808.669.039	78,69%	Sangat Baik
7	Long Beleh Haloq	5.534.937.400	4.913.727.465	88,78%	Sangat Baik
8	Long Beleh Modang	5.862.145.973	5.674.410.756	96,80%	Sangat Baik
9	Muai	5.726.225.171	5.424.441.178	94,73%	Sangat Baik
10	Perdana	4.766.238.600	4.396.509.243	92,24%	Sangat Baik
11	Bukit Layang	5.905.675.729	5.661.646.032	95,87%	Sangat Baik
Jumlah		**63.916.802.229**	**58.886.728.079**	**92,13%**	**Sangat Baik**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

B. Realisasi Anggaran

Gambar 3.6.
Infografis Anggaran Dan Realisasi Kecamatan Kembang Janggut

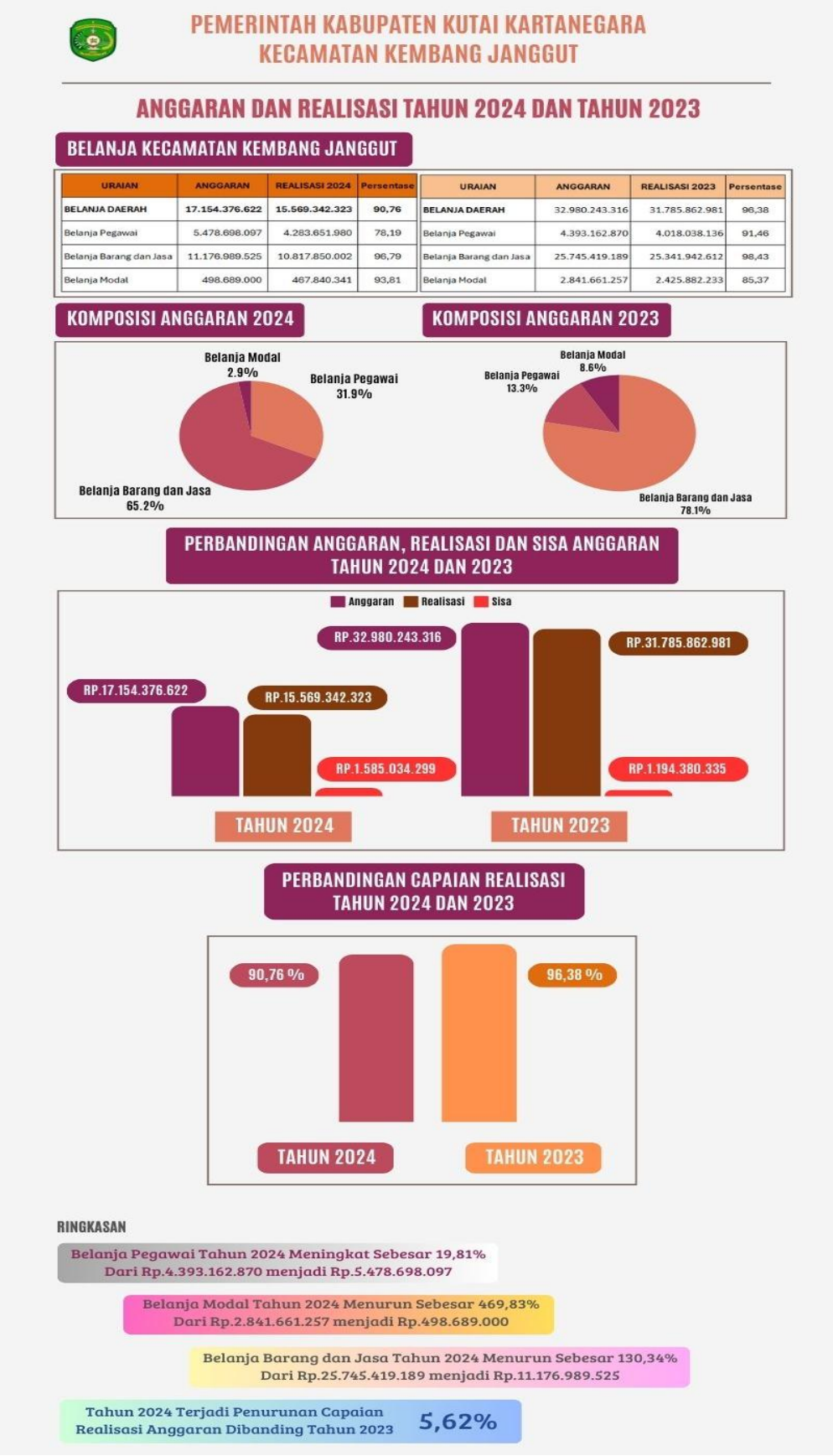

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Persentase
BELANJA DAERAH	17.154.376.622	15.569.342.323	90,76
Belanja Pegawai	5.478.698.097	4.283.651.980	78,19
Belanja Barang dan Jasa	11.176.989.525	10.817.850.002	96,79
Belanja Modal	498.689.000	467.840.341	93,81

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	Persentase
BELANJA DAERAH	32.980.243.316	31.785.862.981	96,38
Belanja Pegawai	4.393.162.870	4.018.038.136	91,46
Belanja Barang dan Jasa	25.745.419.189	25.341.942.612	98,43
Belanja Modal	2.841.661.257	2.425.882.233	85,37

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ada pada Kecamatan Kembang Janggut dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **90,76%**, dari pagu sebesar Rp.17.154.376.622,- dan terealisasi sebesar Rp.15.569.342.323,- yang terdiri dari 4 (enam) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) subkegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 capaian realisasi anggaran sebesar **96,36%** yang berarti mengalami penurunan sebesar **5,62%**. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
		Operasi		Modal				
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR KEWILAYAHAN	**16.655.687.622**	**15.101.501.982**	**498.689.000**	**467.840.341**	**17.154.376.622**	**15.569.342.323**	**90,76%**
	KECAMATAN	**16.655.687.622**	**15.101.501.982**	**498.689.000**	**467.840.341**	**17.154.376.622**	**15.569.342.323**	**90,76%**
	Kecamatan Kembang Janggut	**16.655.687.622**	**15.101.501.982**	**498.689.000**	**467.840.341**	**17.154.376.622**	**15.569.342.323**	**90,76%**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.371.319.750**	**6.052.304.463**	**188.800.000**	**184.000.341**	**7.560.119.750**	**6.236.304.804**	**82,49%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**245.000.000**	**233.284.600**	**-**	**-**	**245.000.000**	**233.284.600**	**95,22%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.713.000	-	-	15.000.000	12.713.000	84,75%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	6.628.400	-	-	7.500.000	6.628.400	88,38%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	5.943.000	-	-	7.500.000	5.943.000	79,24%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	5.582.400	-	-	7.500.000	5.582.400	74,43%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.500.000	4.680.000	-	-	7.500.000	4.680.000	62,40%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000	197.737.800	-	-	200.000.000	197.737.800	98,87%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.573.813.197**	**4.372.798.080**	**-**	**-**	**5.573.813.197**	**4.372.798.080**	**78,45%**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.289.918.097	4.114.191.980	-	-	5.289.918.097	4.114.191.980	77,77%

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
		Operasi		Modal				
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	113.135.100	109.835.100	-	-	113.135.100	109.835.100	97,08%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	12.331.000	-	-	15.000.000	12.331.000	82,21%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	155.760.000	136.440.000	-	-	155.760.000	136.440.000	87,60%
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**32.500.000**	**25.765.000**	**-**	**-**	**32.500.000**	**25.765.000**	**79,28%**
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.660.000	-	-	5.000.000	4.660.000	93,20%
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	5.380.000	-	-	7.500.000	5.380.000	71,73%
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	8.705.000	-	-	10.000.000	8.705.000	87,05%
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	7.020.000	-	-	10.000.000	7.020.000	70,20%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**400.500.000**	**364.050.150**	**18.800.000**	**17.411.000**	**419.300.000**	**381.461.150**	**90,98%**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.666.000	-	-	5.000.000	4.666.000	93,32%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	27.786.000	-	-	35.000.000	27.786.000	79,39%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	18.800.000	17.411.000	18.800.000	17.411.000	92,61%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	19.874.000	-	-	25.000.000	19.874.000	79,50%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.500.000	2.460.000	-	-	5.500.000	2.460.000	44,73%

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
		Operasi		Modal				
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	12.425.000	-	-	15.000.000	12.425.000	82,83%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	256.554.150	-	-	270.000.000	256.554.150	95,02%
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.000.000	40.285.000	-	-	45.000.000	40.285.000	89,52%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**332.063.169**	**318.605.613**	**-**	**-**	**332.063.169**	**318.605.613**	**95,95%**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.497.500	-	-	2.500.000	2.497.500	99,90%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.596.041	130.866.225	-	-	135.596.041	130.866.225	96,51%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	10.696.000	-	-	15.000.000	10.696.000	71,31%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.967.128	174.545.888	-	-	178.967.128	174.545.888	97,53%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**787.443.384**	**737.801.020**	**170.000.000**	**166.589.341**	**957.443.384**	**904.390.361**	**94,46%**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.000.000	202.305.067	-	-	203.000.000	202.305.067	99,66%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.443.384	122.025.000	-	-	167.443.384	122.025.000	72,88%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	13.960.000	-	-	17.000.000	13.960.000	82,12%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	399.510.953	80.000.000	77.066.237	480.000.000	476.577.190	99,29%

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
		Operasi		Modal				
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	90.000.000	89.523.104	90.000.000	89.523.104	99,47%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.467.883.000**	**8.306.253.519**	**276.801.000**	**256.940.000**	**8.744.684.000**	**8.563.193.519**	**97,92%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**45.000.000**	**42.845.000**	**-**	**-**	**45.000.000**	**42.845.000**	**95,21%**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000	42.845.000	-	-	45.000.000	42.845.000	95,21%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**8.422.883.000**	**8.263.408.519**	**276.801.000**	**256.940.000**	**8.699.684.000**	**8.520.348.519**	**97,94%**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	814.938.000	726.386.800	276.801.000	256.940.000	1.091.739.000	983.326.800	90,07%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.607.945.000	7.537.021.719	-	-	7.607.945.000	7.537.021.719	99,07%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**466.484.872**	**418.839.000**	**33.088.000**	**26.900.000**	**499.572.872**	**445.739.000**	**89,22%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**466.484.872**	**418.839.000**	**33.088.000**	**26.900.000**	**499.572.872**	**445.739.000**	**89,22%**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	466.484.872	418.839.000	33.088.000	26.900.000	499.572.872	445.739.000	89,22%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**350.000.000**	**324.105.000**	**-**	**-**	**350.000.000**	**324.105.000**	**92,60%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**350.000.000**	**324.105.000**	**-**	**-**	**350.000.000**	**324.105.000**	**92,60%**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
		Operasi		Modal				
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	325.000.000	304.365.000	-	-	325.000.000	304.365.000	93,65%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	19.740.000	-	-	25.000.000	19.740.000	78,96%
	Jumlah	**16.655.687.622**	**15.101.501.982**	**498.689.000**	**467.840.341**	**17.154.376.622**	**15.569.342.323**	**90,76%**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2024

Tabel 3.18.
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Kembang Janggut

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.546.000	96,97%	454.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.213.500	92,14%	786.500
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	6.295.000	83,93%	1.205.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.556.000	95,56%	444.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.500.000	5.740.000	76,53%	1.760.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.452.000	96,35%	548.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.165.222.870	3.800.028.136	91,23%	365.194.734
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	14.536.000	96,91%	464.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	13.779.000	91,86%	1.221.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	192.030.000	188.810.000	98,32%	3.220.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.445.000	48,90%	2.555.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.500.000	54.975.000	95,61%	2.525.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	8.510.000	85,10%	1.490.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	8.635.000	86,35%	1.365.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	71.117.700	94,82%	3.882.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.560.000	91,20%	440.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	51.912.000	94,39%	3.088.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	47.528.000	95,06%	2.472.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.675.000	51.913.000	90,01%	5.762.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.294.000	97,25%	206.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0%	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.195.000	31.195.000	100%	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	349.272.000	99,79%	728.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.626.000	24.129.000	90,62%	2.497.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	442.290.000	88,46%	57.710.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	863.719.950	522.510.462	60,50%	341.209.488
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.000.000	265.675.000	98,40%	4.325.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.820.000	67.340.000	96,45%	2.480.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100%	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.558.550	68.798.822	91,05%	6.759.728
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.870.000	99,57%	130.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.000.000	172.280.983	94,14%	10.719.017
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.941.500	193.379.000	97,70%	4.562.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.723.384	117.148.678	91,01%	11.574.706
		Pemeliharaan Mebel	-	-	0%	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	100%	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.020.000.000	1.014.827.821	99,49%	5.172.179
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	88.732.800	88,73%	11.267.200
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.614.000	33.786.000	87,50%	4.828.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.359.000	26.902.000	80,64%	6.457.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	4.992.750	99,86%	7.250
	7.01 . 7-01.0-00.0-00.14.0.0 . 2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	549.965.112	467.464.000	85,00%	82.501.112
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.707.978.000	22.526.401.239	99,20%	181.576.761
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	30.695.000	87,70%	4.305.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000	24.991.000	99,96%	9.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	329.450.950	306.198.000	92,94%	23.252.950
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban mum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	36.360.000,00	90,90%	3.640.000
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	12.995.000,00	86,63%	2.005.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	186.000.000	164.000.000,00	88,17%	22.000.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	311.864.000	301.776.000,00	96,77%	10.088.000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.000.000	4.000.000,00	100%	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50.000.000	49.940.000,00	99,88%	60.000
Jumlah			**32.980.243.316**	**31.781.295.891**	**96,36%**	**1.198.947.425**

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut tahun 2024 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021-2026. Kecamatan Kembang Janggut telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Indikator Kinerja Utama

a. Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan diperoleh sebesar 129,17% (Sangat Tinggi) dari target Nilai 70 dan diperoleh nilai 90,42.

2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

a. Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 100% (Sangat Tinggi).
b. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 125% (Sangat Tinggi).
c. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebesar 254% (Sangat Tinggi).
d. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan sebesar 0% (Sangat Rendah).

3. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tambahan

a. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi).
b. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun sebesar 84,85% (Tinggi).

c. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi).
d. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi).
e. Capaian Kinerja Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan sebesar 100% (Sangat Tinggi).
f. Capaian Kinerja Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
g. Capaian kinerja Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya sebesar 0% (Sangat Rendah)
h. Capaian Kinerja Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi)
i. Capaian Kinerja Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi)
j. Capaian Kinerja Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun sebesar 100% (Sangat Tinggi)
k. Capaian Kinerja Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 100% (Sangat Tinggi)
l. Capaian kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir sebesar 100% (Sangat Tinggi)
m. Capaian kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
n. Capaian kinerja Internalisasi Core Values ASN Berakhlak kerja sebesar 100% (Sangat Tinggi)

o. Capaian kinerja Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) sebesar 100% (Sangat Tinggi)
p. Capaian kinerja Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit sebesar 100% (Sangat Tinggi)
q. Capaian kinerja Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
r. Capaian kinerja Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
s. Capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 103,82% (Sangat Tinggi)
t. Capaian kinerja Prestasi Inovasi Perangkat Daerah sebesar 0% (Sangat Rendah)
u. Capaian kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100% (Sangat Tinggi)
v. Capaian kinerja Pengamanan Aset Tanah sebesar 76,15% (Tinggi)
w. Capaian kinerja Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
x. Capaian kinerja Jumlah program pengentasan kemiskinan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
y. Capaian kinerja Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional sebesar 59,36% (Rendah)
z. Capaian kinerja Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender sebesar 100% (Sangat Tinggi)
aa. Capaian kinerja Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% sebesar 100% (Sangat Tinggi)
bb. Capaian kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan sebesar 225,4% (Sangat Tinggi)
cc. Capaian kinerja Nilai LPPD sebesar 86,49% (Tinggi)
dd. Capaian kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sebesar 90,30% (Sangat Tinggi)

ee. Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 93,94% (Sangat Tinggi)
ff. Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah sebesar 118,20% (Sangat Tinggi)
gg. Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah sebesar 97,21% (Sangat Tinggi)
hh. Capaian kinerja Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
ii. Capaian kinerja Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau sebesar 100% (Sangat Tinggi)
jj. Capaian kinerja IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) sebesar 129,17% (Sangat Tinggi)
kk. Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 99,70% (Sangat Tinggi)
ll. Capaian kinerja Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebesar 119,75% (Sangat Tinggi)
mm. Capaian kinerja Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
nn. Capaian kinerja SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)

Capaian kinerja Realisasi Anggaran tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja realisasi anggaran Kecamatan Kembang Janggut sebesar 90,76% atau sebesar 5,62%.

B. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Kembang Janggut akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait

pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,

2) Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Kembang Janggut yang sudah memenuhi target maka akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Kembang Janggut banyak mengalami kendala dalam pengelolaan arsip perangkat daerah. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Kembang Janggut dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.
3) Akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap ASN yang belum melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kembang Janggut, 28 Februari 2025
Plt. Camat Kembang Janggut

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

SUHARTONO, S.KM.
Pembina
NIP 19810217 200801 1 014

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. HALIM, M.Si

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;

2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";

4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

8 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

9 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

10 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;

11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;

12 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

13 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

14 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

15 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;

16 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;

17 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;

18 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

20 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA	Pihak Pertama, CAMAT
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.	**Drs. H. HALIM, M.Si** Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196605051987021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	10
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	3
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100

5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100

11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	1
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100

21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57

34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	361.000.000	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.477.261.481	APBD
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.236.739.000	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		**15.275.000.481**	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
CAMAT

Drs. H. HALIM, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196605051987021002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHARTONO, S.KM.**
Jabatan : **Plt. CAMAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**
Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan jasa secara efektif, transparan, dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Penggunaan Barang Milik Daerah;

7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas peningkatan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan indeks Pelayanan Publik ;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Melaksankan upaya mitigasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien ;
10. Melaksanakan manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efesien";
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirsakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara ;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kembang Janggut, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua, **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**	Pihak Pertama, **Plt. CAMAT**
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.	**SUHARTONO, S.KM.** Pembina (IV/a) NIP. 19810217 200801 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	10
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	3
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang diadakan	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
7	Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Satuan Harga)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Usulan Standar Satuan Harga Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak ianjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Jumlah	1
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerJa PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
30	Meningkatya Kinerja Periyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efekêf, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
37	Meningkatrıya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Linglcungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
40	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.560.119.750,-	APBD-P
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.744.684.000,-	APBD-P
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	499.572.872,-	APBD-P
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	350.000.000,-	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		**17.154.376.622,-**	

Kembang Janggut, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. CAMAT

SUHARTONO, S.KM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19810217 200801 1 014

CROOSCUTTING KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2024

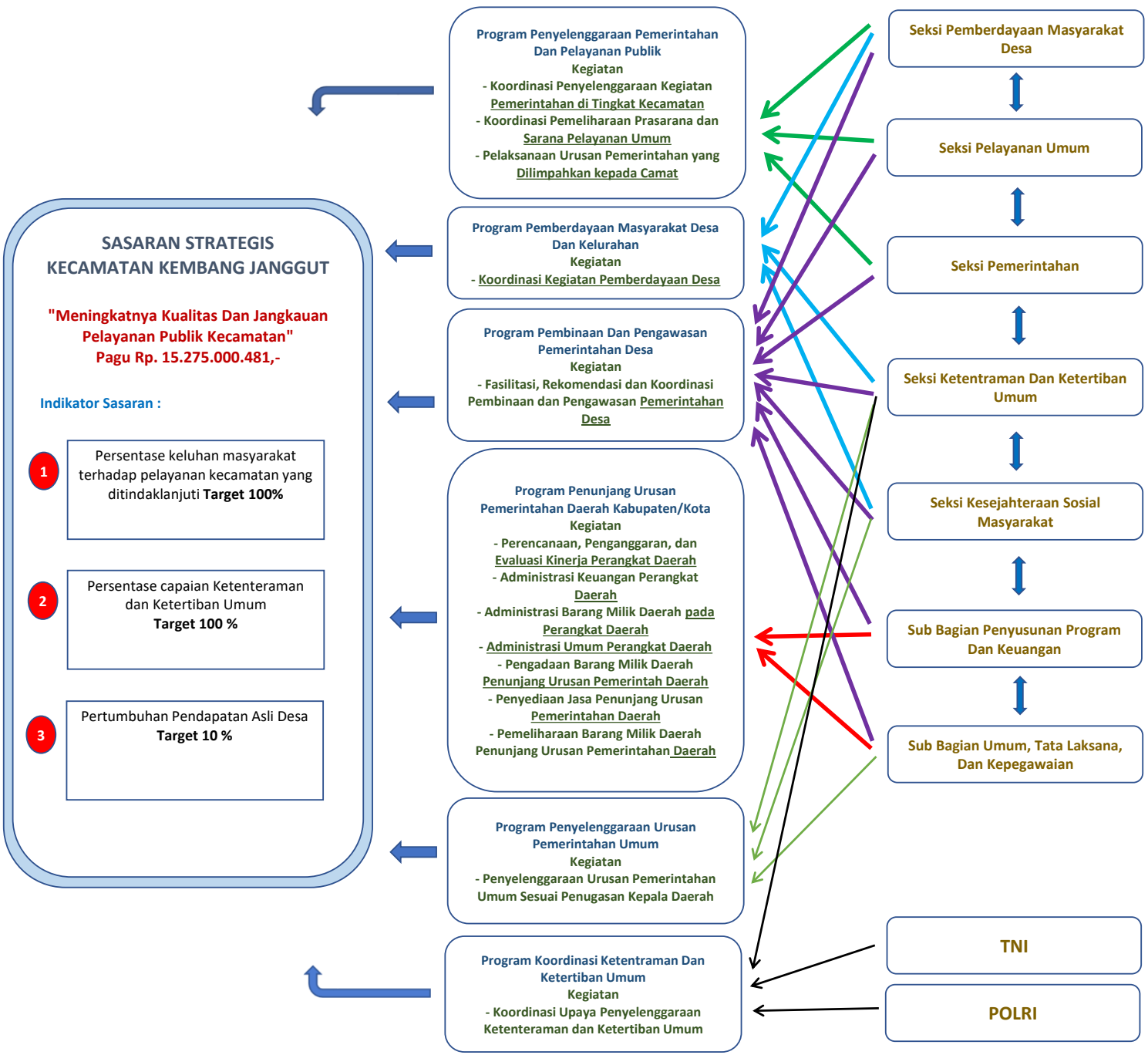

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA

Jl. Jenderal Sudirman No.001 Kembang Janggut
Kode Pos 75551, Telepon / Faximile -

I. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan knowledge management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja.
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai :

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/ monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja.
3. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunann Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V. DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

VI. PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

VII. KRITERIA KEBERHASILAN

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/ melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

VIII. DOKUMEN PELENGKAP

1.1 Perjanjian Kinerja

1.2 Renstra

1.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1.4 Kuesioner Kepuasan Pelanggan

1.5 Dokumen hasil penilaian SAKIP

IX. PROSEDUR

9.1 Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

1. Camat memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja.
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Seksi-seksi.
7. Sekrateriat dan Seksi-seksi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisikepada Tim SAKIP.
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja.
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
10. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.

11. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Menyimpan data kinerja.

9.2 Prosedur Pengukuran Kinerja

1. Camat memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja.
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART.
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan.
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris.
8. Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
9. Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Menyimpan data kinerja.

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA						MUTU BAKU			
		KEPALA	SEKRETARIAT	KEPALA SEKSI	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA TAPKIN Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
6	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan				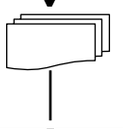		Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja	

7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.						Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas				**TIDAK**		Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi kepala Dinas	
10							Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			

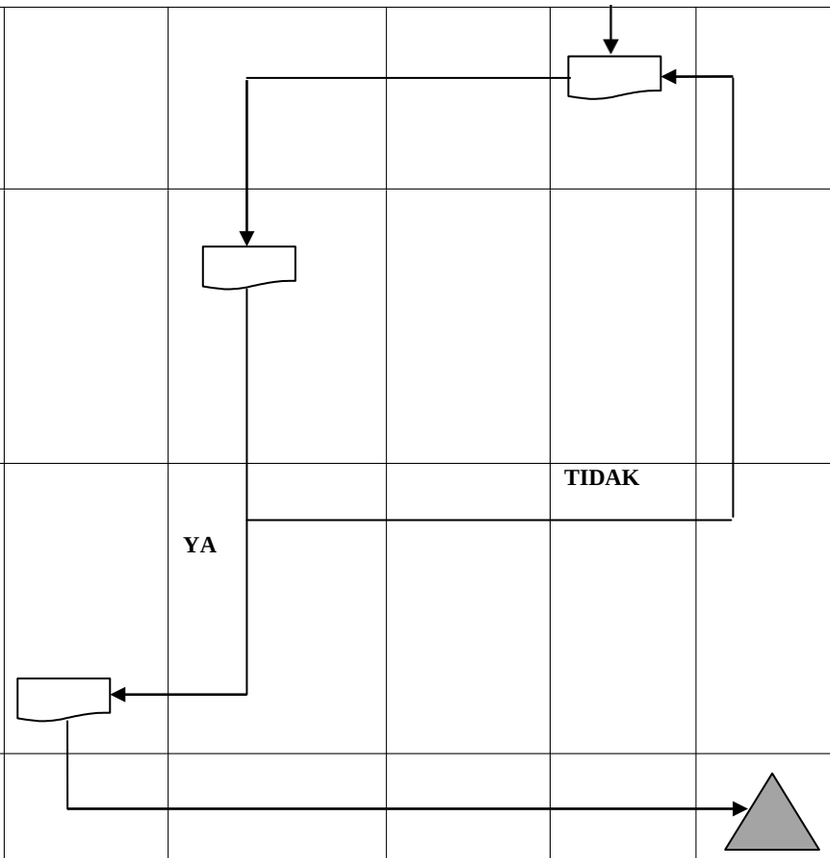

CAMAT KEMBANG JANGGUT

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19681024 199003 1 004

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA	KEPALA	SEKRETARIAT	KEPALA SEKSI	TIM SAKIP	STAF	MUTU BAKU			
							Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, TAPKIN, PKPT, LIHP, Data TL, Hasil Survey, Lap. Hasil Evaluasi, SAKIP Menpan RB	1 hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	5 menit	Bukti Tanda Terima formulir	

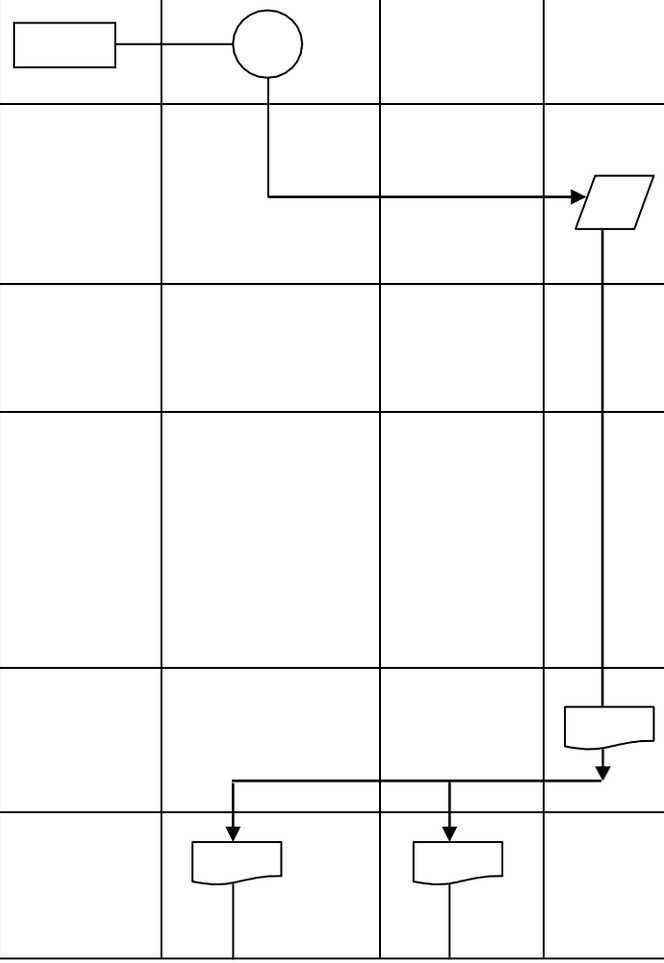

7	Sekretariat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP		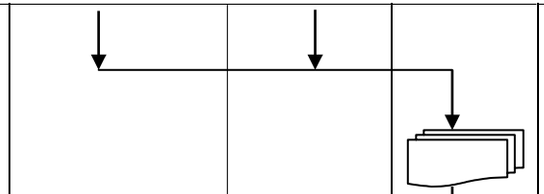				Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja						Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		**YA**	**TIDAK**			Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	90 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Dinas						Laporan hasil pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Kepala Dinas	
12	Pengarsipan Data Kinerja						Arsip hasil pengumpulan data kinerja			

CAMAT KEMBANG JANGGUT

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19681024 199003 1 004

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa